



REVISI RENCANA STRATEGIS



TAHUN 2016 - 2021



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS**



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Sulaiman Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas
MUARA BELITI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS
Nomor : **10 /KPTS//DISHUB/2017**

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PELAPORAN
PENCAPAIAN KINERJA, KEUANGAN DAN ASET
TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Dokumen Pelaporan Pencapaian Kinerja, Keuangan dan Aset, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Dokumen Pelaporan Pencapaian Kinerja, Keuangan dan Aset Tahun 2017;
- b. bahwa pembentukan Tim Penyusunan Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas;
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
8. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran RI Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP dan TAPKIN;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 15) tanggal 31 Desember 2016;
17. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 75) tanggal 31 Desember 2016;
18. Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 01/KPTS/V/2017 Tanggal 4 Januari 2017 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran / Penggunaan Barang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musirawas Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Pelaporan Pencapaian Kinerja, Keuangan dan Aset Tahun 2017 dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Penyusunan Dokumen sebagaimana dimaksud dikum KESATU, bertugas melaksanakan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data dan mengevaluasi data untuk disusun dan selaras dalam rangka mengukur kinerja pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2017, melalui anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja di SKPD dengan Kode Kegiatan : 2.09.2.09.01.05.05;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 30 Januari 2017

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS**



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Musi Rawas (sebagai laporan)
2. Inspektur Kab. Musi Rawas di Muara Beliti
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Musi Rawas di Muara Beliti
4. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab. Musi Rawas di Lubuklinggau
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
NOMOR : 10 /KPTS//Dishub /2017
TANGGAL : 30 JANUARI 2017

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENSTRA TAHUN 2017**

Tim Penyusunan Dokumen RENSTRA :

- Pengarah : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
- Penanggung Jawab : SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
- Ketua : Arpandi, SE
- Sekretaris : Dian Andi Rabama, SE
- Anggota : 1. M. Taufik, SE
2. Jentir Utoyo, SE
3. Nuraini, SE

- Operator Komputer (Non PNS) : 1. Riki Efriadi
2. Lis Maria Putri

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS**



Drs. ADI WINATA, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19730908 199302 1 003



KATA PENGANTAR

Sesungguhnya segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kenyamanan kepada kita sehingga kita dapat menunaikan perintahNya serta diberikan kesempatan sebagai abdi negara untuk melayani masyarakat, sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10)

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas tahun 2016-2021, Alhamdulillah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2021 telah dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu.

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas.

Berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 5.a/KPTS/BAPPEDA/2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 649/KPTS/Bappeda/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021.

Kebijakan Pembangunan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas mutlak dilakukan melalui program-program yang tepat, jelas dan terarah sesuai dengan Visi dan Misi, Rencana Strategis serta aspirasi masyarakat melalui musrenbang tingkat desa/kelurahan dan kecamatan sehingga pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.



Secara umum RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 -2021 memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan dinas dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan APBD yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021.

Secara rinci RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2016 -2021 berisi informasi kemajuan yang telah dicapai, masalah serta tantangan dan peluang yang akan dihadapi pada masing masing bidang urusan di lingkungan dinas. Dari telaahan tersebut kemudian dirumuskan sasaran pembangunan yang ingin dicapai serta prioritas pembangunan yang akan dipilih dengan mengacu pada agenda pembangunan yang perlu diselesaikan dalam kurun waktu 2016 -2021. Dengan arah kebijakan pada masing masing bidang, yang meliputi Bidang Angkutan Darat, Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Darat, selanjutnya disusun program pembangunan, dan berbagai kegiatan dengan indikatif pendanaan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan publik.

Selanjutnya dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, maka kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Muara Beliti,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. ADI WINATA, M.Si
PEMBINA TINGKAT 1
NIP. 19730908 199302 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I : PENDAHULUAN 1	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (PD)	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD.....	10
2.2. Sumber Daya PD	15
2.3. Kinerja Pelayanan PD.....	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.....	33
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD.....	36
3.2. Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	37
3.3. Telaahan Rencana K/L dan Renstra	45
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	51
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	55
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	57





BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	60
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	62
BAB VII	: INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	70
BAB IX	: PENUTUP	80

DAFTAR TABEL

1.	Tabel II.1	Jumlah SDM menurut Golongan	15
2.	Tabel II.2	Jumlah SDM menurut Jabatan	15
3.	Tabel II.3	Jumlah SDM menurut Pendidikan	16
4.	Tabel II.4	Pegawai yang mengikuti kualifikasi Diklat Teknis	16
5.	Tabel II.5	Daftar Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan & pangkat/gol th 2016...	17
6.	Tabel II.6	Aset Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas	17
7.	Tabel II.7	Jalan Kabupaten Musi Rawas	20
8.	Tabel II.8	Jarak antara Ibukota Kecamatan ke Kecamatan Lainnya.....	20
9.	Tabel II.9	Data Fasilitas Terminal	21
10.	Tabel II.10	Jumlah Kendaraan Bermotor	22
11.	Tabel II.11	Kendaraan Bermotor telah uji menurut jenis	23
12.	Tabel II.12	Kendaraan Bermotor wajib uji menurut jenisnya	23
13.	Tabel II.13	Kendaraan Angkutan Umum (yang terdaftar) menurut trayek	24
14.	Tabel II.14	Data Rambu menurut jenis	25
15.	Tabel II.15	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan (Marka Jalan)	25
16.	Tabel II.16	Data Jumlah APILL	25
17.	Tabel II.17	Data Kondisi Terminal	26
18.	Tabel II.18	Data Jumlah Fasilitas Lainnya	26
19.	Tabel II.19	Penerimaan PAD	27
20.	Tabel II.20	Data Pendanaan Anggaran	28
21.	Tabel II.21	Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
22.	Tabel II.22	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD.....	31
23.	Tabel III.1	Data Kecelakaan.....	37
24.	Tabel III.2	Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah	54
25.	Tabel III.3	Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah.....	54
26.	Tabel IV.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD	59
27.	Tabel V.1	Visi Misi Kabupaten Musi Rawas	60
28.	Tabel VI.1	Rencana Program Prioritas Yang Disertai Pendanaan Indikatif	65



29. Tabel VII.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	71
30. Tabel VII.2	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	72
31. Tabel VII.3`	Rencana Pencapaian Indikator Kinerja Utama.....	75
32. Proyeksi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM Bidang Perhubungan.....		77



DAFTAR GAMBAR

1.	Gambar I.1	Bagan Alur Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD.....	2
2.	Gambar I.2	Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	3
3.	Gambar I.3	Pola Pikir Penyusunan Renstra	4
4.	Gambar II.1	Struktur Organisasi Dishub	14



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode lima tahun, yang disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja OPD) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Musi Rawas, dengan demikian sehingga Renstra OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Fungsi Renstra OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD yang memuat *visi, misi, tujuan, kebijakan, program* dan *kegiatan* pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang bersifat *indikatif*.

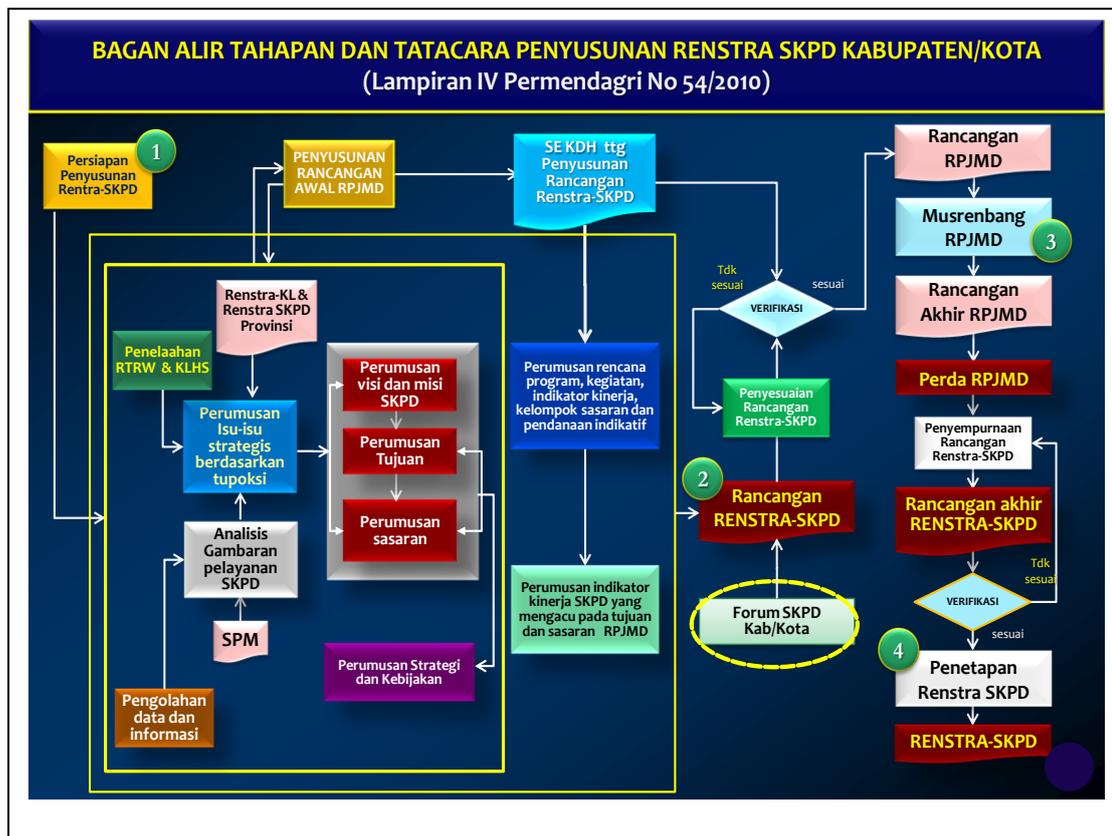
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 secara tegas menetapkan keberadaan Daerah Otonom, yang penyelenggaraannya secara bulat dan utuh dilaksanakan di daerah Kabupaten dan Kota. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri serta berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Perhubungan, berkewajiban juga menyusun Rencana Strategis.

Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana strategis yang disusun oleh Dinas Perhubungan merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah penting dengan memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada.

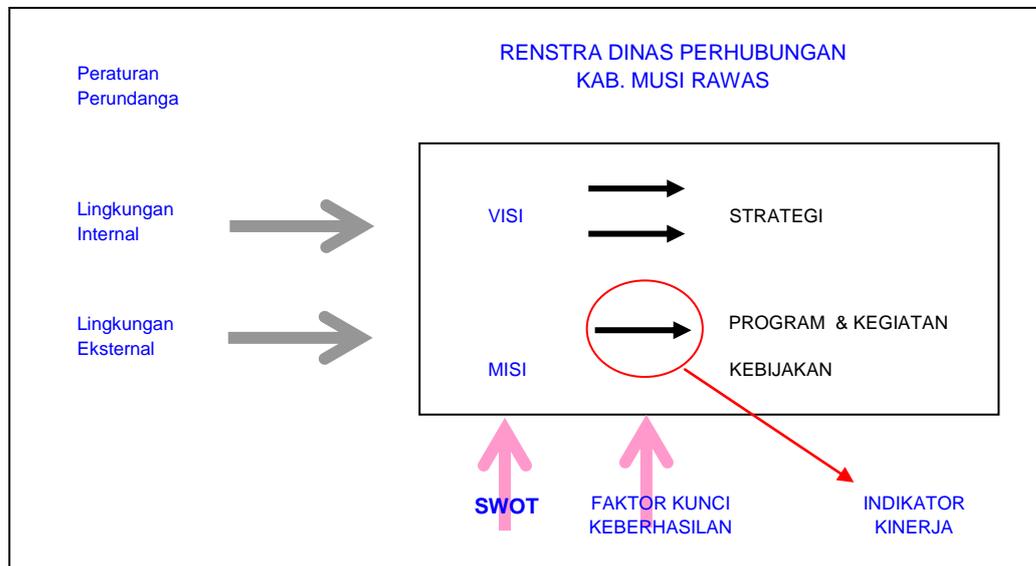
Gambar I.1.
Bagan Alir tahapan dan tatacara penyusunan Renstra OPD



Dalam penyusunan Renstra ini dirumuskan berdasarkan data dan informasi yang disinkronkan dengan Peraturan perundang-undangan, Renstra Kementerian serta Renstra Provinsi Sumsel.

Pola pikir penyusunan Rencana dan Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas ditampilkan pada Gambar berikut ini.

Gambar I.3.
POLA PIKIR PENYUSUNAN RENCANA DAN STRATEGI



Alur pikir penyusunan Rencana dan Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas dimulai dengan latar belakang permasalahan yang meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal Dinas perhubungan saat ini, yang secara signifikan memberikan pengaruh serta peraturan perundangan perundangan sebagai landasan penyusunan. Terlihat pada gambar tersebut bahwa penyusunan rencana strategis tersebut harus diperhatikan beberapa aspek berpengaruh, yang meliputi peraturan perundangan terkait yang berlaku dan pengaruh lingkungan strategis. Pengaruh lingkungan strategis yang dimaksud dapat berupa implikasi dari perubahan atau pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan dapat juga berupa dampak atas diberlakukannya peraturan perundangan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan kota Praja di Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821)
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang –undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4700);
8. Undang-undang nomor: 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja daerah;
19. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 61/2911/Sj 2016 tentang Tidaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 14)
21. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018;
23. Peraturan Dearah Kabupaten Musi Rawas No. 7 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Musi Rawas Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021.
26. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas adalah untuk memberikan arah kebijakan pembangunan bidang perhubungan sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Tujuan penulisan RENSTRA adalah :

- Sebagai landasan acuan dalam Penyusunan program dan kegiatan lima tahunan.
- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan
- Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- Sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Pedoman untuk memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- Alat organisasi dalam peningkatan koordinasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan



BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Rencana K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB IX. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu Dinas Daerah dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10) dan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang Perhubungan;
- b. Perumumusan kebijakan teknis dan operasional bidang Perhubungan;
- c. Pelaksanaan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan;
- d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Perhubungan;
- e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2.1.1.1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perkantoran, umum dan kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan keuangan, serta koordinasi dan pembinaan penyusunan program dan kegiatan dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Dinas;
- b. Pengkoordinasian perencanaan program dan kegiatan dinas;
- c. Pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan dinas;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja Dinas; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian dan beberapa orang staf yaitu:

- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

2.1.1.2 Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Darat :

Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Darat di pimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bimbingan, pengawasan dan pengendalian bidang Lalu Lintas Jalan, Sungai dan Danau.

Untuk melaksanakan tugasnya, bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Darat menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun program dan kegiatan bidang Lalu Lintas Jalan, Sungai dan Danau;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan bimbingan, pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas Jalan, Sungai dan Danau;
- c. Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam penertiban Lalu Lintas, bimbingan teknis keselamatan, serta sarana dan prasarana Lalu Lintas Jalan, Sungai dan Danau;
- d. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas Jalan, Sungai dan Danau;
- e. Pengkoordinasian dengan UPT. Dinas dalam pelaksanaan bimbingan, pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas Jalan, Sungai dan Danau;

- f. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penertiban, bimbingan teknis keselamatan, serta sarana dan prasarana Lalu Lintas Jalan, Sungai dan Danau; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Darat dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi dan beberapa orang staf yaitu:

- Kepala Seksi Lalu Lintas;
- Kepala Seksi Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas;
- Kepala Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas.

2.1.1.3 Bidang Angkutan Darat

Bidang Angkutan Darat di Pimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bimbingan, pengawasan dan pengendalian bidang angkutan jalan, sungai dan danau.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Angkutan Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan rencana bidang angkutan jalan, sungai dan danau;
- b. Perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan angkutan jalan, sungai dan danau;
- c. Pembinaan, koordiasi dan fasilitasi angkutan umum di jalan, sungai dan danau;
- d. Penempatan jaringan angkutan orang dan angkutan barang di jalan, sungai dan danau;
- e. Penghitungan biaya angkutan operasional angkutan orang dan angkutan barang di jalan, sungai dan danau;
- f. Penghitungan kebutuhan angkutan orang dan angkutan barang di jalan, sungai dan danau;
- g. Pengoordinasikan dan fasilitasi pembinaan perusahaan angkutan di jalan, sungai dan danau;
- h. Penyusunan penetapan tarif angkutan orang, umum;
- i. Pengoordinasian dengan UPT Dinas dalam melaksanakan angkutan di jalan, sungai dan danau; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Angkutan Darat dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi dan beberapa orang staf yaitu:

- Kepala Seksi Angakutan Orang dan Barang;
- Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan;
- Kepala Seksi Kemitraan dan Penyuuhan Angkutan.

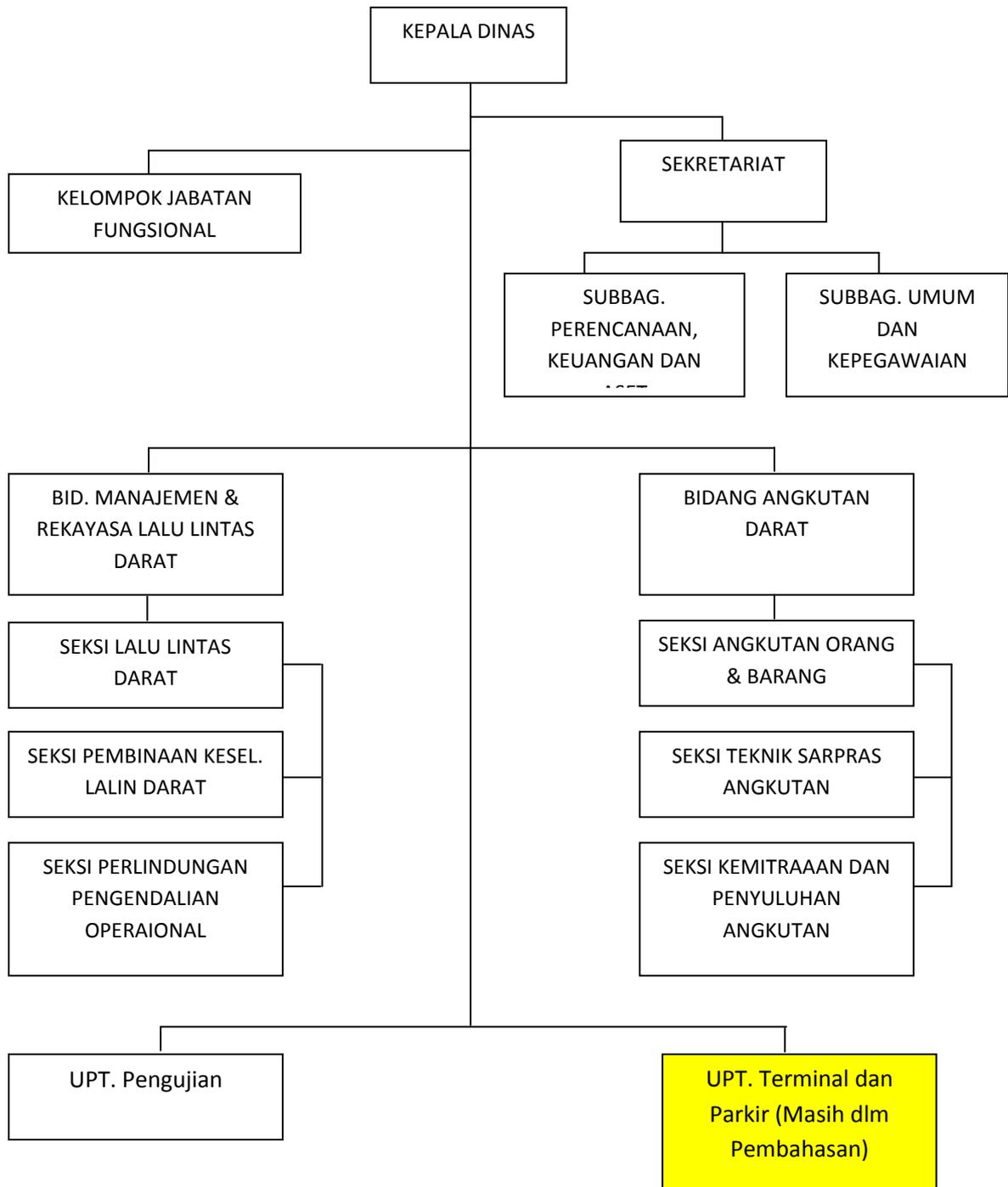
2.1.2 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian;
- b. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- e. Kelompok jabatan fungsional mempunyai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi sebagaimana gambar berikut :

Gambar : II.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
Perbub. No. 39 Tahun 2016



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dinas Perhubungan Kabupaten

Musi Rawas saat ini memiliki potensi sumber daya manusia yang handal sebagai modal atau suatu kekuatan pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Adapun sumber daya manusia sebagai potensi / kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kab. Musi Rawas dapat dilihat di bawah ini :

2.2.1.1 Menurut Golongan

Tabel II. 1
SDM Menurut Golongan

Golongan	A	B	C	D	Jumlah Orang
I	-	-	-	-	-
II	1 Org	4 Org	20 Org	1 Org	26 Org
III	16 Org	5 Org	3 Org	8 Org	32 Org
IV	1 Org	1 Org	1 Org	-	3 Org
Jumlah ...					61 Org

Sumber data: DUK Dinas Perhubungan

2.2.1.2 Menurut Jabatan

Tabel II.2
SDM Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Esselon IIb (Kepala SKPD)	1 Org
2.	Esselon III a (Sekretaris)	1 Org
3.	Esselon III b (Kabid)	2 Org
4.	Esselon IVa (Kasi, KUPTD)	10 Org
5.	Esselon IVb (TU UPTD)	1 Org
6.	Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor (PKB)	3 Org
Jumlah		18 Org

Sumber data : DUK Dinas Perhubungan

2.2.1.3 Menurut Pendidikan

Tabel II.3
SDM Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S-3	-
2.	S-2	3 Org
3.	S-1 / D-IV	23 Org
4.	D-III	3 Org
5.	SLTA	32 Org
6.	SLTP	-
	Jumlah.....	61 Org

Sumber data : DUK Dinas Perhubungan

Daftar Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas tahun 2016, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel II.4
Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Kualifikasi Diklat Teknis

No.	Nama Diklat Teknis	Jumlah (Orang)
1	Bidang Angkutan Darat - PPNS - Pengujian Kendaraan Bermotor - Pengawasan	2 3 1
2	Umum - Pengadaan Barang /Jasa - Perencana Pembangunan - Kearsipan - Bendahara Barang - Bendahara Penerimaan - Bendahara Pengeluaran	2 2 1 1 1 1

Sumber data : DUK Dinas Perhubungan

Tabel II. 5
Daftar Kepegawaian Dinas Perhubungan
Kabupaten Musi Rawas
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Pangkat/Golongan Tahun 2016

Tingkat Pendidikan	Pangkat/Gol (orang)												Jlh (org)
	IV	IIIId	IIIc	IIIb	IIIa	IId	IId	IId	IId	IId	IId	IId	
S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S1/D4	1	4	2	5	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Akademi/DIII	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
SLTA	-	3	1	-	3	1	20	4	1	-	-	-	-
SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	3	8	4	2	9	2	13	5	-	-	-	-	61

Sumber data: Sekretariat Dishub Kab. Musi Rawas

2.2.2. Asset / Modal

Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas didukung oleh Sumber Daya asset / modal yang tercatat pada Dinas Perhubungan sampai dengan 31 Desember 2015

Tabel II.6
Aset Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas

No	Asset	Jumlah Satuan	Kondisi
1	Tanah / Bangunan <ul style="list-style-type: none">Gedung KantorGedung Balai PKBGedung TerminalDermaga	16.000 M2 5.000 M2 5 Unit 3 Unit	Baik Baik Baik Baik
2	Kendaraan <ul style="list-style-type: none">Roda 4Roda 2	4 Unit 12 Unit	Baik Baik

3.	Perlengkapan Barang Elektronik <ul style="list-style-type: none">- Pesawat Telepon / Telepon Kantor- Alat Komunikasi Lainnya (HT)- Televisi- Laptop/notebook- Peralatan KIR- Kamera- Mesin Ketik	1 Buah 12 Buah 1 Buah 7 Unit 1 Paket 4 Unit 2 Unit	Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
4.	Perlengkapan Kantor <ul style="list-style-type: none">- Genset- Lemari Arsip- Meja - Kursi - Finger Print- Mesin Potong Rumput	2 Buah 22 Buah 40 Buah 70 Buah 1 Unit 3 Buah	Baik Baik 30 Baik 10 Rusak Berat 40 baik 20 Rusak ringan, 10 Rusak Berat Baik Baik

Sumber data: Sekretariat Dishub Kab. Musi Rawas

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Pelayanan PD

Dalam hal pelayanan SKPD periode 2010 – 2016, Kabupaten Musi Rawas Utara masih bagian dari wilayah Kabupaten Musi Rawas, namun setelah disyahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2014 Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB) memisahkan diri dari Kabupaten Musi Rawas, sehingga data yang ditampilkan masih termasuk gabungan wilayah muratara, Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas telah melaksanakan realisasi kegiatan pembangunan dan pengembangan sebagai berikut :

1. Uji Kelayakan Sarana Kendaraan Bermotor untuk menjamin keselamatan penumpang dan kendaraan pada saat beroperasi di jalan dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor.
2. Menciptakan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal dengan melakukan penyelenggaraan operasional terminal penumpang.
3. Melakukan penyelenggaraan dan pengendalian kepelabuhan, lalu lintas sungai dan danau.
4. Fasilitasi perencanaan pembangunan perkeretaapian.
5. Bantuan kendaraan angkutan perdesaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan pembagian sarana keselamatan kendaraan roda dua.
6. Peningkatan kesadaran berlalu lintas melalui penertiban lalu lintas angkutan di jalan, pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ.
7. Peningkatan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan melalui penyediaan sarana dan prasarana rambu, marka, RPPJ, Guardrail, APILL dan lain-lain.
8. Penyelenggaraan perparkiran.
9. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, instansi terkait dan lintas sektoral.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Musi Rawas melalui strategi, program dan kegiatan, dengan berpedoman kepada RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi dan informasi.

Potensi dan kondisi sektor Perhubungan terdiri dari :

2.3.1.1 BIDANG ANGKUTAN DARAT

a. Prasarana Jalan

Penyediaan jaringan jalan yang baik akan berpengaruh kepada efisiensi dan efektifitas lalu lintas dan angkutan jalan. Nilai tambah dan daya saing suatu produk di daerah akan semakin tinggi apabila jaringan jalanya dalam kondisi baik.

Peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain.

Untuk menjangkau daerah dalam Kabupaten Musi Rawas ini, pemerintah telah menyediakan prasarana jalan, sampai dengan tahun 2015 dengan rincian status jalan sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini :

Tabel II. 7
JALAN KABUPATEN MUSI RAWAS

NO	KEADAAN	JALAN NASIONAL	JALAN PROVINSI	JALAN KABUPATEN	JALAN DESA
1	Jenis Permukaan				
	a. Aspal/Hotmix/ATB	253,49 Km	101,20 Km	455,82 Km	352,30 Km
	b. Lapen	-	-	- Km	100,00 Km
	c. Kerikil / Koral	-	73,85 Km	440,18 Km	223,00 Km
	d. Tanah	-	24,85 Km	299,71 Km	400,00 Km
	e. Tidak Terinci	-	-	- Km	-
Jumlah		253,49 Km	199,90 Km	1.195,71 Km	1.075,30 Km
2	Kondisi Jalan				
	a. Baik	250,49 Km	-	614,75 Km	603,00 Km
	b. Sedang	3 Km	97,20 Km	318,83 Km	141,30 Km
	c. Rusak	-	62,85 Km	248,84 Km	242,00 Km
	d. Rusak Berat	-	39,85 Km	13,30 Km	89,00 Km
Jumlah		253,49 Km	199,90 Km	1.059,69 Km	1.344,39 Km

Sumber data : Musi Rawas Dalam Angka 2015

Tabel II.8
Jarak Antara Ibukota Kecamatan ke Kecamatan Lainnya dalam Kabupaten Musi Rawas

No	Kecamatan	Jarak Antar Kecamatan (km)						
		STL Ulu	Selangit	Sumber Harta	Tugumulyo	Purwodadi	Muara Beliti	TP. Kepungut
01.	STL Ulu	0	12	20	33	18	54	80
02.	Selangit	12	0	8	21	38	42	68
03.	Sumber Harta	20	46	0	13	9	34	60
04.	Tugumulyo	33	21	13	0	15	21	47

05.	Purwodadi	18	38	9	15	0	36	62
06.	Muara Beliti	54	42	34	21	36	0	26
07.	TP. Kepungut	80	68	60	47	62	26	0
08.	Jayaloka	96	84	76	63	78	42	16
09.	Sukakarya	89	77	69	56	71	35	9
10.	Muara Kelingi	90	78	70	57	50	36	10
11.	BTS Ulu	115	103	95	82	97	61	35
12.	Tuah Negeri	75	63	55	42	55	21	5
13.	Muara Lakitan	127	115	407	94	109	73	47
14.	Megang Sakti	52	50	32	35	120	56	82

Sumber data : Musi Rawas dalam angka 2015

b. Terminal.

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Kabupaten Musi Rawas memiliki **1 terminal penumpang tipe A (yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau)** dan 5 terminal penumpang tipe C, dengan kondisi terminal sebagai berikut :

Tabel II.9
DATA FASILITAS TERMINAL

No.	FASILITAS	KONDISI		KETERANGAN
		BAIK	TDK. BAIK	
A	FASILITAS UTAMA a. Jalur Kedatangan b. Jalur Keberangkatan c. Tempat Parkir d. Bangunan Kantor e. Tempat Tunggu Penumpang	√ √ √ √ √		

B	f. Menara Pengawas	√		
	g. Locket	√		
	h. Pelataran Parkir Bus			
	i. Rambu	√		
	- Papan Pengumuman			
	- Daftar / Papan Tarif per trayek			
	- Daftar/ Petunjuk Jurusan			
	FASILITAS PENUNJANG	√		
	a. Toilet			
	b. Musholah			
c. Kios / Kantin				
d. Ruang Pengobatan				
e. Ruang Informasi				
f. Ruang Perwakilan	√			
g. Taman Penghijauan				

Sumber data : Bidang Angkutan Darat Dishub Kab. Musi Rawas

c. Sarana Angkutan

Angkutan adalah perpindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Angkutan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas dapat dibagi dalam 3 jenis, yaitu :

- Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), dimana Kabupaten Musi Rawas merupakan tempat asal dan tujuan maupun hanya sebagai lintasan dari kota – kota di Sumatera dan Jawa dan sebaliknya.
- Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang menghubungkan kota-kota yang terdapat didalam Provinsi Sumatera Selatan (lintas Kabupaten/ Kota).
- Angkutan perdesaan yang menghubungkan dari desa ke ibukota kecamatan dan ibukota Kabupaten / kota Lubuklinggau.

Tabel II.10

Jumlah Kendaraan Bermotor Tercatat di Samsat di Kabupaten Musi Rawas, 2016

No	Bulan	Kendaraan Bermotor							
		Sedan	Jeep	Mini Bus	Microbus / Bus	Pick Up	Truck	Sepeda Motor	Ransus
01.	Januari	8	33	307	0	253	105	2.427	2
02.	Februari	2	29	291	3	208	71	2.231	3
03.	Maret	3	20	300	3	247	87	2.291	4
04.	April	5	20	272	2	218	74	2.355	3
05.	Mei	3	23	294	0	221	65	2.763	3
06.	Juni	4	25	376	1	322	86	2.975	4
07.	Juli	0	20	256	2	213	44	2.504	4
08.	Agustus	9	25	286	2	259	56	3.143	1
09.	September	5	29	320	3	283	88	3.214	6
10.	Oktober	5	20	307	4	248	62	2.411	3

11.	November	7	43	380	3	289	111	2.861	2
12.	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	51	287	3.389	23	2.761	851	29.175	35

Sumber data : Samsat Musi Rawas
Tanggal proses 09-12-2016

Tabel II.11
Jumlah Kendaraan Bermotor yang telah diuji Menurut Jenis Kendaraan pada
Dinas Perhubungan
Kabupaten Musi Rawas, 2012-2016

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan				
		2012	2013	2014	2015	2016
01.	Mobil Penumpang Umum	70	55	35	27	18
02.	Mobil Bus Umum	24	17	17	21	11
03.	Mobil Bus Tak Umum	25	21	25	21	26
04.	Mobil Barang Umum	429	524	640	756	632
05.	Mobil Barang Tak Umum	4.300	4.085	3.923	3.996	3950
06.	Kendaraan Khusus Umum	15	10	32	27	44
07.	Kendaraan Khusus Tak Umum	17	17	18	17	43
08.	Kereta Tempel / Gandeng Umum	-	-	-	-	-
09.	Kereta Tempel / Gandeng Tak Umum	-	-	-	-	-
	Jumlah	4.880	4.729	4.690	4.865	4724

Sumber data : Balai PKB Dishub Kab. Musi Rawas

Tabel II.12
Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Menurut Jenis Kendaraan pada Dinas
Perhubungan Kabupaten Musi Rawas, 2012-2015

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan				
		2012	2013	2014	2015	2016
01.	Mobil Penumpang Umum	89	54	34	27	18
02.	Mobil Bus Umum	24	17	14	21	11
03.	Mobil Bus Tak Umum	22	21	12	21	26
04.	Mobil Barang Umum	280	325	397	756	632
05.	Mobil Barang Tak Umum	3008	3001	2818	3.996	3950
06.	Kendaraan Khusus Umum	16	10	-	27	44
07.	Kendaraan Khusus Tak Umum	28	18	-	17	43
08.	Kereta Tempel / Gandeng Umum	-	-	21	-	-
09.	Kereta Tempel / Gandeng Tak Umum	-	-	10	-	-
	Jumlah	3.467	3.446	3.306	4.865	4724

Sumber data : Balai PKB Dishub Kab. Musi Rawas
Ket : data masih tergabung dengan Kabupaten Musi Rawas Utara

Tabel II.13
Jumlah Kendaraan Angkutan Umum (yang Terdaftar) menurut Trayek di
Kabupaten Musi Rawas, 2012-2016

Trayek	Jumlah Kendaraan									
	Mobil Penumpang Umum					BUS				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
Angkutan Perdesaan										
- Lubuklinggau – Muara Lakitan	-	-	9	-	-	2	3	-	-	-
- Lubuklinggau – Muara Kelingi	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-
- Lubuklinggau – Tugumulyo	5	15	11	-	-	-	-	-	-	-
- Lubuklinggau – Muara Beliti	13	9	6	-	-	-	-	-	-	-
- Lubuklinggau – Jayaloka	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-
- Lubuklinggau – Rantau Serik	10	13	7	-	-	-	-	-	-	-
- Lubuklinggau – Megang Sakti	-	4	7	-	-	-	-	-	-	-
- Lubuklinggau – Terawas	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-
- Lubuklinggau – BTS Ulu	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-

Sumber data : Musi Rawas dalam angka 2015

Ket : data masih tergabung dengan Kabupaten Musi Rawas Utara

d. Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan dimaksudkan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pengguna jalan dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan. Fasilitas tersebut meliputi rambu lalu lintas, traffic light, warning light, pagar pengaman jalan, paku marka jalan serta marka jalan.

2.3.1.2 BIDANG MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ini merupakan bidang yang baru di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10) dan berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 39)

2.3.1.2.1 Sarana Dan Prasarana Lalu Lintas Jalan

Tabel II.14
Data Rambu menurut Jenisnya

No	Status	Peringatan	Larangan	Perintah	Petunjuk	Jumlah Total
1	Jalan Nasional	203	-	25	12	240
2	Jalan Provinsi	330	-	20	30	380
3	Jalan Kabupaten	405	4	2	5	416
4	Jalan Desa	-	-	-	-	-
Jumlah		938	4	47	47	1.036

Sumber data : Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Tabel II.15
Data Marka Jalan

No	Status	Dibutuhkan (Km)	Sudah dilengkapai (Km)	Kondisi		
				Baik / Jelas (%)	Sedang (%)	Pudar (%)
1	Jalan Nasional	247	5,5	50	30	20
2	Jalan Provinsi	198	0,6	60	30	10
3	Jalan Kabupaten	1.173	23,9	70	20	10
4	Jalan Desa	-	-	-	-	-
Jumlah		1.618	30	180	80	40

Sumber data : Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Tabel II.16
Data Jumlah APILL

No	Status	Sudah terpasang	Kondisi	
			Berfungsi	Tdk. Berfungsi
1	≥ Simpang 4	8 titik	8 titik	-
2	Simpang 3	24 titik	24 titik	-
3	Penyeberangan	2	2	-
4	Ruas Jalan (Warning Light)	-	-	-

Sumber data : Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dishub Kab. Musi Rawas

Tabel II.17
Data Kondisi Terminal

No	Nama Terminal	Type	Luas (Ha)	Instansi Pengelola	Ket
1	Terminal Terawas	C	1	Dishub	Penumpang
2	Terminal Megang Sakti	C	0,25	Dishub	Penumpang
3	Terminal Tugumulyo	C	0,25	Dishub	Penumpang
4	Terminal Simpang Semambang	C	0,25	Dishub	Penumpang
5	Terminal Muara Lakitan	C	0,25	Dishub	Penumpang

Sumber data : Bidang Angkutan Jalan Dishub Kab. Musi Rawas

Tabel II.18
Data Jumlah Fasilitas lainnya

No	Status	Dibutuhakan	Sudah terpasang	Kondisi	
				Berfungsi	Tdk. Berfungsi
1	RPPJ Besar	20 bh	3 bh	3	-
2	RPPJ Kecil	180 bh	69 bh	69	-
3	Nama Jalan	800 bh	71 bh	71	-
4	Guadriil	300 m	196 m	196	-

Sumber data : Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dishub Kab. Musi Rawas

2.3.1.3 Pendapatan Retribusi

Dinas Perhubungan mengelola pungutan 4 jenis retribusi daerah yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum
 - Retribusi Pelayanan Parkir Umum
 - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Retribusi Jasa Usaha
 - Retribusi Jasa Terminal
 - Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - Angkutan Perusahaan
3. Retribusi Perizinan Tertentu
 - Izin Trayek

Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2016 disajikan dalam tabel

Tabel II.19

Penerimaan PAD Dinas Perhubungan Kab. Musi Rawas 2010-2016

No	URAIAN	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
		Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH														
	HASIL RETRIBUSI DAERAH														
	RETRIBUSI JASA UMUM														
	- Retribusi Parkir di tepi jalan umum	0		10.110.000	81	17.100.000	114	30.300.000	101	30.160.000	101	18.000.000	90	17.400.000	87
	- Retribusi Kendaraan Bermotor	242.489.540	96	257.736.940	102	314.265.900	113	304.668.350	101	304.360.900	101	242.261.400	78	307.279.500	99,44
	RETRIBUSI JASA USAHA														
	- Retribusi Jasa Terminal	418.525.750	69	613.273.750	102	720.913.850	111	704.562.700	104	617.348.250	146	488.278.250	103	416.573.500	87,70
	- Retribusi Tempat Khusus Parkir	0		1.400.000	80	3.400.000	113	5.200.000	104	5.220.000	104	4.870.000	89	4.500.000	81,82
	- Angkutan Perusahaan	26.812.500	80	33.611.000	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	31.820.000	106	0	0	0	0	1.000.000	100	0	0	0	0	0	0
	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	1.080.000	75	3.810.000	30	4.000.000	100	6.050.000	101	8.150.000	136	3.300.000	55	4.650.000	77,69
	- Izin Trayek														
	RETRIBUSI LAIN-LAIN														
	- Sumbangan Pihak ketiga Migas	0	0	0	0	0	0	0	0	1.519.892.105	38	0	0	0	0

Tabel II.20

DATA PENDANAAN ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2010 – 2016

No	Kode Rekening	Program	Anggaran Pendanaan Program per Tahun						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		Belanja Tidak Langsung	3.188.054.400	3.220.406.078	3.705.044.454	3.964.397.533	3.471.851.014	3.735.142.460	5.330.506.299
		Belanja Pegawai	3.188.054.400	3.220.406.078	3.705.044.454	3.964.397.533	3.471.851.014	3.735.142.460	5.330.506.299
		Belanja Langsung	18.903.987.000	11.792.077.000	11.811.552.000	15.546.949.000	9.600.000.000	8.848.681.700	7.963.563.200
	1.07.1.07.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.625.442.500	1.875.807.500	1.031.150.000	1.931.771.000	1.154.488.000	1.317.129.700	1.240.121.800
	1.07.1.07.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90.000.000	92.000.000	160.000.000	475.000.000	175.000.000	265.000.000	257.000.000
	1.07.1.07.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	90.000.000	-	170.000.000	137.500.000
	1.07.1.07.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	139.225.000	81.200.000	40.000.000	210.000.000	25.000.000	150.000.000	70.000.000
	1.07.1.07.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	40.000.000	40.000.000	75.000.000	40.920.000
	1.06.1.07.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	40.000.000	40.000.000	-	-	-	-
	1.07.1.07.01.15.	Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan	-	-	-	2.807.656.000	-	-	-
	1.07.1.07.01.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	-	-	95.000.000	395.000.000	100.000.000	99.100.000	55.000.000
	1.07.1.07.01.17.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	121.040.000	384.742.500	573.333.500	878.740.000	742.625.000	701.250.000	100.000.000
	1.07.1.07.01.18.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	311.870.000	2.632.077.000	1.579.867.500	212.955.000	225.000.000	-	-
	1.07.1.07.01.19.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	325.710.000	1.722.000.000	492.600.000	2.158.893.300	1.267.394.000	1.058.120.000	1.479.021.400



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS



1.07.1.07.01.20.	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	-	70.000.000	-	-	-	2.500.000.000	1.701.000.000
1.07.1.07.01.21.	Program Pengembangan Bandara Silampari	15.745.569.500	3.715.000.000	6.090.190.000	4.350.000.000	4.408.493.000	500.000.000	-
1.07.1.07.01.22.	Program Pengembangan LLASDP	-	-	332.819.000	300.000.000	-	50.000.000	-
1.20.1.07.01.26.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	-	450.500.000	-	-	-	-	-

2.3.2. Pencapaian Kinerja

Sebagai unsur pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, maka capaian kinerja dari seorang Kepala Dinas Perhubungan adalah ditentukan pada kemampuan menyusun dan mengimplementasikan kebijakan daerah di bidang perhubungan, serta tugas-tugas lainnya dengan mengacu pada capaian indikator kinerja dari Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Perbandingan capaian dan realisasi indikator kinerja dari table diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabl II.21
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2011-2016						Realisasi Capaian Tahun 2011-2016						Rasio Capaian pada Tahun 2011-2016					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perhubungan	80%	85%	-	20%	40%	53%	65%	70%	75%	17%	22%	63,36%	73,95%	75%	75%	85%	55%	119%	113%	107%	100%
2	Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan	1%	0,50%	-	1%	0,90%	0,80%	0,70%	0,60%	0,50%	1,30%	0,77%	1,04%	0,74%	1,03%	0,93%	130%	85%	13%	105%	171%	186%

Tabel II.22
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Musi Rawas

Uraian Program Kegiatan	Anggaran pada Tahun 2012-2016					Realisasi Anggaran pada Tahun 2012-2016					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2012-2016					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,031,150,000	2,131,771,000	1,154,488,000	1,371,129,700	1,240,121,800	973,393,324	1,822,881,042	1,126,850,685	1,162,952,235	1,031,683,241	0,94	0,86	0,97	0,85	0,83	1.385.732.100	1.223.552.105
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	160,000,000	475,000,000	175,000,000	265,000,000	257,000,000	75,463,000	343,839,500	151,648,800	195,303,250	222,794,600	0,47	0,72	0,87	0,74	0,87	266.400.000	197.809.884
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	90,000,000	0	170,000,000	137,500,000	0	86,000,000	0	168,742,000	137,394,000	0	0,96	0	0,99	0,99	79.500.000	78.427.200
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40,000,000	210,000,000	25,000,000	150,000,000	70,000,000	15,900,000	103,748,000	12,000,000	97,617,800	0	0,39	0,49	0,84	0,65	0	99.000.000	45.853.160
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	40,000,000	40,000,000	75,000,000	40,920,000	0	39,710,000	38,751,500	53,783,400	38,062,000	0	0,99	0,97	0,72	0,30	39.184.000	34.061.380
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000
Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan	0	2,807,656,000	0	0	0	0	2,752,394,250	0	0	0	0	0,98	0	0	0	561.531.200	550.478.850
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	95,000,000	395,000,000	100,000,000	99,100,000	55,000,000	89,975,000	384,617,000	99,014,500	91,684,738	53,173,000	0,95	0,97	0,09	0,92	0,97	148.200.000	143.692.847
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	573,333,500	878,740,000	742,625,000	701,250,000	100,000,000	509,789,500	731,191,535	708,608,500	616,461,000	92,580,000	0,89	0,83	0,95	0,88	0,93	599.189.700	531.726.107
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1,579,867,500	212,955,000	225,000,000	0	0	1,491,563,550	204,740,000	222,868,500	0	0	0,94	0,96	0,99	0	0	403.564.500	383.834.410
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	492,600,000	2,158,893,300	1,267,394,000	1,058,120,000	1,479,021,400	459,416,200	2,091,615,185	1,204,169,106	957,506,000	1,430,628,000	0,92	0,97	0,95	0,90	0,97	1.291.205.740	1.228.666.898
Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	0	0	0	2,500,000,000	1,701,000,000	0	0	0	2,474,903,600	1,670,941,000	0	0	0	0,99	0,98	840.200.000	829.168.920



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS



Program Pengembangan Bandara Silampari	6,090,190,000	4,426,420,200	4,408,493,000	500,000,000	0	5,401,416,200	1,334,165,101	4,264,822,842	269,348,355	0	0,89	0,30	0,97	0,53	0	3.085.020.640	2.253.950.499
Program Pengembangan LLASDP	332,819,000	300,000,000	0	50,000,000	0	323,987,500	273,410,000	0	22,520,000	0	0,97	0,93	0	0,45	0	136.563.800	123.893.500

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Analisis SWOT yaitu kondisi internal (Strength dan Weaknesses) dan kondisi eksternal organisasi (Opportunities dan Threats), adapun analisis terhadap lingkungan internal (Strength dan Weaknesses) Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Kekuatan (Strengths)

1. Ketersediaan pegawai yang cukup
2. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yang jelas
3. Ketersediaan sarana kerja yang memadai
4. Adanya penerapan disiplin pegawai

Kelemahan (Weaknesses)

1. Motivasi dari pegawai yang kurang
2. Kurangnya aparatur dengan kompetensi bidang perhubungan, sehingga kemampuan aparatur di bidang perhubungan cukup lemah
3. Kurangnya pengiriman pendidikan formal dan informal bidang perhubungan
4. Masih lemahnya pelaksanaan sistem monitoring dan pengendalian
5. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi internal dan eksternal

Sedangkan Analisis Faktor Eksternal (Opportunities dan Threats) lebih menekankan pada kondisi diluar, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yaitu Peluang dan Ancaman yang berpengaruh terhadap kerja, tujuan dan hasil kerja Pemerintah. Analisis faktor eksternal tersebut adalah sebagai berikut:

Peluang (Opportunity)

1. Tersedianya angkutan desa (angdes) yang melayani pelosok desa;
2. Letak geografis yang strategis dimana Kabupaten Musi Rawas yang berada di daerah persimpangan antar Sumatera Bagian Barat dan Pulau Jawa.
3. Adanya perluasan wilayah yang belum tertangani.

Tantangan (Threat)

1. Masih rendahnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas. Ini diindikasikan dengan adanya kecenderungan peningkatan terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Musi Rawas.
2. Ketidakpedulian masyarakat terhadap pentingnya sarana dan fasilitas transportasi, sehingga banyak fasilitas transportasi yang rusak akibat orang yang tidak bertanggung jawab.

Jenis-jenis Pelayanan, Perkiraan Besaran Kebutuhan Pelayanan Dan Lokasi Pelayanan

1. Jenis-jenis Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas

- Pengurusan Kendaraan Bermotor (PKB)
- Dispensasi Kelas Jalan
- Terminal Angkutan Penumpang (Type C)
- Dermaga/Pelabuhan Sungai
- Izin Angkutan Sungai Dalam Kabupaten

2. Perkiraan besaran kebutuhan

No	Jenis-jenis kebutuhan	Taksiran Kebutuhan	Lokasi
1.	Alat-alat Pengujian Kendaraan Bermotor : - Alat Uji Asap - Alat Uji Emisi - Alat Uji Rem - Side Slip Tester - Alat Uji Lampu - Alat Uji Kebisingan Suara - Alat Uji Kegelapan Kaca	Rp. 3.000.000.000	Kantor/Balai Pengujian Kendaraan Bermotor di Muara Beliti



No	Jenis-jenis kebutuhan	Taksiran Kebutuhan	Lokasi
2.	Perambuan (darat dan sungai) : - rambu-rambu peringatan - rambu-rambu - rambu-rambu larangan - rambu-rambu perintah - rambu-rambu penunjuk - rambu-rambu bersuar Marka Jalan : - marka putus-putus - marka utuh - zebra cross	8 30 6 12 4 6 Marka garis : - Melintang - Membujur - kerucut	Kecamatan Megang Sakti, Kecamatan Tugumulyo, Kecamatan Tuah Negeri, Kecamatan Muara Beliti

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas memiliki permasalahan antara lain :

- a. Kondisi Fisik Kabupaten Musi Rawas yang sangat beragam;
- b. Kualitas dan Kuantitas SDM yang handal belum memadai sebagai pelayanan publik;
- c. Masih tingginya kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih (overload dan oversize) dan rendahnya alokasi dana pemeliharaan;
- d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas keselamatan transportasi;
- e. Penyediaan bahan kebijakan teknis berupa dokumen perencanaan umum bidang transportasi komunikasi dan pemutakhiran data-data lalu lintas belum terwujud secara optimal;
- f. Pembangunan sarana penunjang dan fasilitas transportasi belum memadai;
- g. Kurangnya Disiplin pengguna jalan dalam berperilaku tertib lalu lintas;
- h. Masih rendahnya kontribusi pihak swasta dalam melakukan investasi terutama dalam pengadaan prasarana transportasi;
- i. Gap yang signifikan antara jumlah dana yang teralokasi untuk penanganan masalah transportasi dibandingkan dengan kebutuhan nyata di lapangan;

Tabel III.1
Data Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2015-2016

No.	Uraian	Tahun	
		2015	2016
1	Jumlah Kecelakaan	102	99
2	Meninggal dunia	62 Org	66
3	Luka Berat	40 Org	48
4	Luka Ringan	116 Org	114
5	Kerugian Material	Rp. 483.000.000	Rp. 566.050.000

Sumber Data : Polres Musi Rawas

3.2. Telaahan visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.2.1 Visi

Proses Pembangunan Kabupaten Musi Rawas lima tahun ke depan tidak bisa dilepaskan dari capaian kinerja lima tahun terakhir, selain telah menghasilkan kemajuan juga masih menyisakan beberapa permasalahan baik permasalahan yang mendasar maupun permasalahan yang berkembang dewasa ini. Kesuksesan mengemban reformasi yang berjalan sebagaimana amanat UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberi perubahan yang lebih baik. Meskipun demikian, berbagai permasalahan mendasar menuntut perhatian khusus dalam membangun ke depan.

Rencana pembangunan Kabupaten Musi Rawas lima tahun ke depan (2016 – 2021) merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas tahap ke III dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas (2005 – 2025). Oleh karena itu, proses pembangunan Kabupaten Musi Rawas lima tahun ke depan tidak bisa dilepaskan dari evaluasi terhadap capaian kinerja lima tahun terakhir yang selain telah menghasilkan kemajuan juga masih menyisakan beberapa permasalahan baik permasalahan yang mendasar maupun permasalahan yang berkembang dewasa ini. Lebih jauh lagi, pembangunan lima tahun ke depan juga dihadapkan dengan akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asia (Asean Economic Community). Selain itu, dalam rangka sinergitas pembangunan dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, maka

rencana pembangunan Kabupaten Musi Rawas lima tahun kedepan yang disusun juga telah berupaya diselaraskan dengan Kebijakan pemerintah pusat seperti Nawacita Presiden Jokowi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 20013 – 2018. Dalam Kesuksesan mengemban reformasi yang berjalan sebagaimana amanat UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberi perubahan yang lebih baik. Meskipun demikian, berbagai permasalahan mendasar menuntut perhatian khusus dalam pembangun ke depan.

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka selaku Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas mengikrarkan diri untuk terus melanjutkan pembangunan Kabupaten Musi Rawas dan meningkatkan kualitas dan kuantitasnya melalui pencanangan visi dan misi. Visi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 -2021 adalah:

Mewujudkan “MURA SEMPURNA 2021”

“Sejahtera, Mandiri, Produktif, Unggul, Religius, Nyaman, dan Aman”

3.2.2 Misi

Sejalan dengan visi tersebut, maka misi yang akan diemban adalah sebagai berikut:

M1	Memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur
M2	Menumbuhkembangkan sistem dan usaha agribisnis dan agroindustri komoditi unggulan
M3	Mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat non petani
M4	Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan
M5	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima
M6	Memantapkan pembangunan masyarakat yang religius menuju MURA Darussalam
M7	Memastikan kondisi Kabupaten MURA yang lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi, menarik, dan berkesan untuk dikunjungi

Dari pernyataan misi kepala daerah tersebut, yang berkaitan dengan bidang perhubungan adalah misi ke 1, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur menuju Musi Rawas Sempurna dengan sasaran Meningkatnya Pelayanan Perhubungan.

3.2.3 Strategi

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga agar segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan Visi dan Misi di atas, strategi pembangunan Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut:

M1. Memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia dan infrastruktur :

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini, dasar, menengah dan tinggi melalui peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas pendidikan serta kualitas tenaga pengajar.
2. Meningkatkan partisipasi lembaga pendidikan non formal dalam rangka meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal.
3. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur secara merata sampai ke perdesaan (jalan, jembatan, irigasi, listrik, air bersih).
4. Mewujudkan peran serta pemuda dalam pembangunan disegala bidang dan meningkatkan prestasi pemuda.
5. Mewujudkan peran OKP dan Organisasi sebagai fasilitator dalam menjalankan perannya secara optimal dan meningkatkan prestasi olahraga.
6. Meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana kesehatan dan tenaga medis.

7. Mendorong budaya gemar membaca.
8. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menuju keluarga sejahtera.
9. Pembangunan peningkatan dan rehabilitasi jalan dari jembatan (pada kawasan desa tertinggal, kawasan perekonomian unggulan dan pembangunan dengan pendanaan kemitraan)
10. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana santasi.
11. Meningkatkan pelayanan air minum dan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
12. Meningkatkan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada kawasan agropolitan serta kawasan strategis dan cepat tumbuh.
13. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan irigasi, rawa, dan sumber pengairan lainnya.
14. Meningkatkan pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau, dan sumber air lainnya.
15. melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar pedesaan dan perbatasan meliputi stimulan penanganan kumuh (BSPK).
16. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur secara merata sampai ke pedesaan.
17. Melaksanakan penataan tata kelola penanganan pemukiman kumuh di pedesaan dan perkotaan
18. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian melalui penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, perluasan areal tanam, peningkatan indeks pertanaman, peningkatan infrastruktur pertanian serta mencegah bertambahnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, dan meningkatkan catchment area serta meningkatkan tutupan lahan di daerah hulu.

M2. Menumbuhkembangkan sistem dan usaha agribisnis dan agroindustri komoditi unggulan:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian melalui penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, perluasan areal tanam, peningkatan indeks pertanaman, peningkatan infrastruktur pertanian serta mencegah bertambahnya alih fungsi lahan

- pertanian ke non pertanian dan mempertahankan catchment area serta meningkatkan tutupan lahan di daerah hulu;
2. Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya agroindustri berskala kecil dan menengah sebagai bagian dari pembangunan industri terpadu.
 3. Membangun industri pertanian berkelanjutan dan berdaya saing global berbasis sumber daya lokal yang mendorong penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas.
 4. Memberdayakan penyuluh pertanian sebagai ujung tombak pembinaan para petani.
 5. Mendorong pengembangan inovasi terutama dalam pengembangan komoditi unggulan daerah.
 6. Mempromosikan dan memperluas pasar komoditas unggulan daerah melalui pemanfaatan ICT (Information and Communication Technology) serta membangun dan memperkuat jejaring kerjasama ekonomi (industri dan perdagangan) dan kelembagaan (regional, nasional dan internasional).
 7. Membangun industri pertanian berkelanjutan dan berdaya saing global berbasis sumber daya lokal yang mendorong penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas;
 8. Memberdayakan penyuluh pertanian sebagai ujung tombak pembinaan para petani;
 9. Mendorong pengembangan inovasi terutama dalam pengembangan komoditi unggulan daerah;
 10. Mempromosikan dan memperluas pasar komoditas unggulan daerah melalui pemanfaatan ICT (Information and Communication Technology) serta membangun dan memperkuat jejaring kerjasama ekonomi (industri dan perdagangan) dan kelembagaan (regional, nasional dan internasional)
 11. Memantapkan ketersediaan, distribusi pangan dan keamanan pangan
 12. Memaksimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pangan lokal menuju kedaulatan pangan;
 13. Penganekaragaman pangan non beras

M3. Mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat non petani:

1. Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi produktif masyarakat non petani melalui peningkatan akses sumber permodalan, produktifitas dan daya saing bagi UKM non pertanian
2. Membangun kemitraan strategis antara koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan usaha besar.
3. Membina usaha ekonomi produktif dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya sehingga menjadi produk yang berdaya saing dan bernilai ekonomi tinggi.
4. Mendirikan lembaga keuangan mikro di tingkat desa dan kelurahan.
5. Menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana perdagangan, meningkatkan daya saing dan pertumbuhan IKM.
6. Meningkatkan kemampuan penyerapan teknologi industri bagi IKM
7. Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi produktif masyarakat non petani melalui peningkatan akses sumber permodalan, produktif dan daya saing bagi UKM non pertanian;
8. Membangun kemitraan strategis antara koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan usaha besar;
9. Membina usaha ekonomi produktif dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya sehingga menjadi produk yang berdaya saing dan bernilai ekonomi tinggi;
10. Mendirikan lembaga keuangan mikro di tingkat desa dan kelurahan

M4. Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan:

1. Meningkatkan SDM aparat melalui kursus, pelatihan yang langsung mendukung profesionalisme dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
2. Mengoptimalkan SDM aparat, kelembagaan masyarakat dan msyarakat yang di dukung dengan anggaran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat setiap kegiatan pembangunan;
5. Meningkatkan pengembangan kawasan perdesaan sesuai kearifan lokal desa, demi terciptanya inovasi perdesaan;

6. Meningkatkan kualitas penanganan PMKS
7. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan swasta dalam setiap kegiatan pembangunan;
8. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dengan pendekatan secara bijak dan tegas terhadap pengganggu kelestaian atau perusak SDA
9. Penyusunan Perda lahan berkelanjutan

M5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima.

1. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik / Good Governance.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan sistem informasi terpadu (e-government).
3. Membangun pelayanan satu titik (one stop services) untuk pelayanan publik, dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan ICT (Information and Communication Technology) di segala bidang.
5. Meningkatkan pengawasan publik untuk menjamin akuntabilitas pelayanan publik.

M6. Memantapkan pembangunan masyarakat yang religius menuju MURA Darussalam:

1. Meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat melalui pendidikan, penerangan dan pengajaran.
2. Menciptakan suasana kehidupan agamis dengan pengamalan nilai-nilai keagamaan serta membina toleransi dan kerukunan hidup antara umat beragama.
3. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan para tokoh keagamaan.

M7. Memastikan kondisi Kabupaten MURA yang lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi, menarik dan berkesan untuk dikunjungi:

1. Menciptakan iklim yang kondusif untuk berinvestasi melalui penerbitan kebijakan (regulasi dan deregulasi) yang mendukung.
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi.

3. Memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik berbasis ICT yang efektif dan efisien dalam pelayanan investasi.

Program Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas dalam mendukung fokus pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas untuk mewujudkan misi dan program kepala daerah sesuai dengan RPJMD adalah sebagai berikut :

- Misi 1 : Memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur
- Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik
- Sasaran : Meningkatnya fasilitas keselamatan transportasi
- Indikator : 1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur perhubungan
2. Persentase penurunan kejadian kecelakaan
- Strategi : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur bidang perhubungan secara merata sampai ke pedesaan
- Arah Kebijakan : 1. Mura Lancar, Layak, Nyaman dan Selamat
2. Gema Proaktif (Gerakan Mura Produktif dan Kreatif)
3. PM2S (Perusahaan Maju, Masyarakat Sejahtera)

Program Dinas Perhubungan :

- Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
- Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
- Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
- Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang Perhubungan
- Program Pengembangan LLASD dan KA

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Provinsi dan Kementerian

3.3.1 TELAAH RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMSEL

Visi merupakan cita-cita dan harapan semua unsur organisasi yang dipergunakan sebagai pedoman dan pendorong untuk mencapai tujuan organisasi yang menggambarkan tentang apa yang akan dicapai di masa depan sebagai hasil komitmen dan kesepakatan semua unsur organisasi. Telah mantapnya penerapan otonomi daerah yang ditunjang oleh berkembangnya system peragangan barang dan jasa unggulan, jaringan kerja dan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Sasaran antara yang telah ditetapkan tersebut, dipandang sebagai sasaran kongkrit yang akan diwujudkan pada jangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, perlu dirumuskan secara tepat Visi, Misi, tujuan dan sasaran, strategi serta pencapaian tujuan dan sasaran dalam bentuk kebijakan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Visi dan misi Dinas Perhubungan Prov. Sumsel ditetapkan dalam rangka untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu : **“Sumatera Selatan Sejahtera dan Terdepan Bersama Masyarakat Cerdas yang Berbudaya”** Untuk mendukung terwujudnya visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tersebut, maka Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan menetapkan visinya yaitu : **“Terwujudnya pelayanan jasa Perhubungan yang efektif dan efisien”**.

Pelayanan Jasa Perhubungan Prov. Sumsel secara garis besar adalah :

A. Pelayanan Jasa Perhubungan

1. Pelayanan Jasa Perhubungan

Pelayanan jasa perhubungan berperan sebagai perspektif transportasi dalam sistem sebagai berikut :

- Sistem Manajemen Demand

Sistem Demand mempunyai kaitan dengan pusat-pusat kegiatan (kawasan perumahan, kawasan industri, kota, desa, penduduk, dsb). Semakin tinggi

kuantitas dan kualitas sistem Manajemen Demand, makin tinggi pula kuantitas dan kualitas Sistem Pergerakan.

- Sistem Manajemen Supply

Sistem Supply mempunyai kaitan dengan fasilitas & pelayanan (laut, udara, darat, pelabuhan, moda, dsb). Semakin tinggi kuantitas & kualitas Manajemen Supply, semakin tinggi pula kuantitas & kualitas Sistem pergerakan.

- Sistem Manajemen Pergerakan

Sistem Pergerakan mempunyai kaitan dengan lalu-lintas orang/barang, besaran (volume), jenis, asal-tujuan, waktu, dsb. Semakin tinggi kuantitas dan kualitas Manajemen Pergerakan, semakin besar dampak terhadap Sistem Kegiatan dan Sistem Jaringan.

Sistem pelayanan jasa Perhubungan terdefiniskan berperan “pasif” jika Sistem Jaringan dan Sistem Pergerakan melayani kebutuhan akibat pertumbuhan Sistem Kegiatan.

B. Efektif dan Efisien

Efektif dan efisien terdefinisi sebagai berikut :

1. Aman

Setiap masyarakat Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan pelayanan jasa bidang perhubungan. Dalam program tersebut dicanangkan program aman berkendara (Safety Riding). Melalui program ini akan menurunkan potensi fasilitas kecelakaan berkendara.

2. Nyaman

Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pendukung dibidang Perhubungan yang menunjang kenyamanan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.

3. Selamat

Setiap masyarakat Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan pelayanan dari program-program keselamatan transportasi baik transportasi laut, udara, maupun jalan. Peningkatan keselamatan transportasi koseperti *Road Safety is No Accident* dengan

sistem berbasis pendataan kecelakaan (*Road Safety Audit*), system pengendalian dan pengawasan.

4. Tepat Waktu

Tersedianya fasilitas transportasi yang tepat waktu dalam menunjang mobilitas kegiatan transportasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

5. Terjangkau

Tersedianya fasilitas bidang Perhubungan dengan biaya yang terjangkau dengan kualitas terbaik.

Visi tersebut mengisyaratkan kondisi yang ideal yaitu terciptanya kualitas pelayanan jasa transportasi yang aman (*security*), nyaman (*comfortable*), selamat (*safety*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan memiliki daya saing yang diindikasikan bahwa penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM professional, mandiri dan produktif. Serta memiliki nilai tambah yang diindikasikan bahwa penyelenggaraan transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya kegiatan usaha masyarakat.

Untuk mencapai Misi tersebut, dirumuskan Misi dengan mengacu kepada 5 (lima) pendekatan, yaitu :

- a. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perhubungan dalam rangka meningkatkan profesionalisme kerja;
- b. Mengembangkan inovasi-inovasi baru terhadap perkembangan teknologi bidang perhubungan;
- c. Meningkatkan daya jangkau infrastruktur bidang perhubungan untuk memperluas aksesibilitas masyarakat;
- d. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan ketertiban bidang perhubungan;
- e. Mempertahankan kondisi sarana dan prasarana perhubungan yang ada agar berfungsi secara maksimal.

Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari visi dan misi serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu satu sampai lima tahun.

Tujuan mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil;
2. Bersifat abstrak, artinya belum dapat dilihat secara kuantitas karena pencapaian tujuan dapat berlangsung secara berkesinambungan;
3. Jangkauan kedepan akan dicapai dalam waktu lima tahun atau lebih sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan dalam rangka mewujudkan Misi Pertama (Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perhubungan dalam rangka meningkatkan profesionalisme kerja) adalah :
 - Mewujudkan sumber daya manusia yang terampil dan professional berbasis kompetensi.
2. Tujuan dalam rangka mewujudkan Misi Kedua (Mengembangkan inovasi-inovasi baru terhadap perkembangan teknologi bidang perhubungan adalah :
 - Memberdayakan sumber daya manusia yang handal didalam mengaplikasikan teknologi terbaru untuk mengembangkan pelayanan kepada masyarakat;
 - Mengaplikasikan pelayanan kepada masyarakat berupa penerapan Sistem Informasi Manajemen minimal berbasis database.
3. Tujuan dalam rangka mewujudkan Misi Ketiga (Meningkatkan daya jangkau infrastruktur bidang Perhubungan untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi) adalah :
 - Mewujudkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat daerah terisolir yang akan membantu mobilisasi ekonomi masyarakat;
4. Tujuan dalam rangka mewujudkan Misi Keempat (Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan ketertiban bidang Perhubungan adalah :

- Memberikan kenyamanan dan kelancaran lalu lintas baik lalu lintas jalan, kereta api, ASDP, laut dan Udara;
 - Meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat akan tertib lalu lintas.
5. Tujuan dalam rangka mewujudkan Misi Kelima (Mempertahankan kondisi sarana dan prasarana perhubungan yang ada agar berfungsi secara maksimal) adalah :
- Mewujudkan penghematan keuangan negara dengan efisien dan tepat.

B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang dapat dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran dan bulanan. Fokus utama sasaran adalah tindakan alokasi, distribusi dan pemanfaatan sumber daya yang mengarah pada hasil nyata.

3.3.2 TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No: 430 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 -2019 Untuk mendukung Visi Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kala, yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**. dan Agenda Pembangunan (Nawacita).

Sasaran dan arah kebijakan umum nasional bidang Perhubungan dan untuk mencapai sasaran menurunnya angka kecelakaan transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2015-2019, yaitu:

1. Ratio kejadian kecelakaan transportasi nasional :
2. Jumlah pedoman standar keselamatan dan keamanan transportasi, dengan target capaian s/d 2019 sebanyak 141 dokumen :
 - a. Transportasi Darat dengan *baseline* 1 dokumen pada tahun 2014, ditargetkan menjadi 19 dokumen studi/kajian/desain/norma/standar/ pedoman/kriteria/prosedur terkait keselamatan bidang Perhubungan Darat sampai pada tahun 2019;

3. Jumlah sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi :

a. Transportasi Darat berupa :

- 1) Jumlah Ketersediaan Marka Jalan dengan *baseline* tahun 2014 sepanjang 400.000 m², ditargetkan menjadi 13.900.000 m² sampai pada tahun 2019;
- 2) Jumlah Ketersediaan Rambu Lalu Lintas dengan *baseline* tahun 2014 sebanyak 800 Unit, ditargetkan menjadi 9.800 Unit sampai pada tahun 2019;
- 3) Jumlah Ketersediaan APILL dengan *baseline* tahun 2014 sebanyak 50 Unit, ditargetkan menjadi 1.645 Unit sampai pada tahun 2019;
- 4) Jumlah Ketersediaan Alat Penerangan Jalan Umum dengan *baseline* tahun 2014 sebanyak 2.500 Unit, ditargetkan menjadi 47.500 Unit sampai pada tahun 2019;
- 5) Jumlah Ketersediaan Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB) dengan *baseline* tahun 2014 sebanyak 0 Unit, ditargetkan menjadi 68 Unit sampai pada tahun 2019;
- 6) Jumlah Ketersediaan Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan dengan *baseline* tahun 2014 sepanjang 20.000 m', ditargetkan menjadi 370.500 m' sampai pada tahun 2019;
- 7) Pembangunan SBNP dan Rambu Sungai (LLASDP) dengan *baseline* tahun 2014 sebanyak 130 Unit, ditargetkan sebanyak 7.958 Unit SBNP dan rambu sungai sampai pada tahun 2019;

PELAYANAN TRANSPORTASI

Dalam rangka peningkatan pelayanan transportasi, Kementerian Perhubungan mempunyai 7 sasaran, yaitu : (1) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, (2) Meningkatnya kompetensi SDM transportasi, meningkatnya kualitas dan kuantitas lulusan diklat SDM perhubungan, (3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dalam mendukung pembangunan bidang transportasi, (4) Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance*, (5) Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan, (6)



Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi, dan (7) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan *clean governance*.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

Prasarana transportasi merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kawasan. Prasarana transportasi yang ada di Kabupaten Musi Rawas meliputi transportasi darat, laut dan udara. Dalam pengembangan ketiga jenis prasarana transportasi tersebut harus dilakukan secara terpadu, sehingga antar jaringan dan moda transportasi dapat berjalan sinergis.

1. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pada umumnya sistem transportasi darat dikaitkan dengan jaringan jalan beserta bangunan pelengkap seperti terminal, jembatan dan terowongan pada jalan. Di Kabupaten Musi Rawas selain jaringan jalan terdapat juga jaringan kereta api. Adapun tujuan pengembangan transportasi darat meliputi :

- 1) Meningkatkan aksesibilitas ke dan dari luar kawasan Kabupaten Musi Rawas, sehingga terjalin keterhubungan wilayah terutama dengan pusat-pusat pengembangan yang lain.
- 2) Menghubungkan antar pusat kegiatan dalam Kabupaten Musi Rawas antara Pusat Kegiatan Lokal utama, dengan Pusat Kegiatan Lokal kedua sampai dengan keempat, sehingga terbentuk struktur tata ruang (sistem kota-kota).
- 3) Mendukung pengembangan Kabupaten Musi Rawas sebagai Kawasan Agropolitan, melalui peningkatan jalan-jalan yang menghubungkan Agropolitan Center dengan Pusat Agropolitan Distrik dan pembangunan terminal/sub terminal agrobisnis/barang.
- 4) Memberi akses bagi semua wilayah pelayanan menuju pusat-pusat layanan.
- 5) Membuka wilayah terisolasi.
- 6) Memberikan dukungan bagi pertumbuhan kawasan-kawasan dengan nilai produksi tinggi seperti kawasan industri, pusat pertanian utama, terminal barang dan kawasan tambang.

2. Jaringan Prasarana Angkutan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan disebutkan terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan pemberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan. Untuk terminal tipe C Kewenangan penetapan terminal penumpang ditetapkan oleh Bupati / Walikota dengan memperhatikan usulan / masukan dari SKPD yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalulintas dan angkutan jalan

- *Terminal Tipe C*

Terminal ini berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan yang dipergunakan dengan tujuan pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum untuk angkutan dalam wilayah kabupaten. Biasanya terminal tipe ini melayani arus minimum kendaraan sebesar 25 kendaraan/jam dengan luas kebutuhan ruang lebih kurang 2,5 Ha, serta terletak di jalan kolektor atau lokal.

Berdasarkan kriteria di atas, maka struktur pengembangan terminal penumpang dan barang di Kabupaten Musi Rawas direncanakan sebagai berikut :

1. Terminal Barang

Terminal barang diperlukan dalam rangka mewujudkan visi Musi Rawas "Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Daerah berbasis Agraris" dengan pengembangan konsep agropolitan. Konsep ini menuntut tersedianya prasarana berupa terminal barang pada agropolitan center dan pusat-pusat agropolitan distrik, yaitu :

- *Terminal Barang / Peti Kemas*

Terminal barang / peti kemas dibangun 6,25 km dari agropolitan center tepatnya di Desa Durian Remuk seluas lebih kurang 50 Ha di Kecamatan Muara Beliti.. Terminal ini diharapkan terhubung dengan jaringan kereta api menuju Pelabuhan Tanjung Api-Api (di Palembang) dan memiliki akses langsung ke rencana kawasan industri.

- *Sub Terminal Barang*

Sub terminal barang adalah terminologi lebih kecil dari suatu simpul pemindahan barang yang ditujukan untuk menyediakan ruang bagi keperluan membongkar/memuat barang serta

perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi di masing-masing pusat agropolitan distrik. Sub terminal barang ini dibangun di tiap agropolitan distrik yaitu Simpang Nibung, Prabumulih, Simpang Terawas, Megangsakti dan Simpang Semambang. Luas yang diperlukan untuk sub terminal barang ini diperkirakan lebih kurang 100 Ha.

2. Terminal Penumpang

Struktur pengembangan terminal penumpang di Kabupaten Musi Rawas diarahkan sebagai berikut :

- Terminal Tipe A : berada di Wilayah Kota Lubuklinggau
- Terminal Tipe C : Kecamatan Tugumulyo, Kecamatan Megang Sakti, Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas, Kecamatan Muara Lakitan

3. Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP)

Kabupaten Musi Rawas memiliki beberapa sungai besar yang mampu dilewati perahu/kapal motor. Potensi ini meskipun tidak sepesat perkembangan transportasi darat tetapi masih dipergunakan sebagian masyarakat Kabupaten Musi Rawas terutama daerah terpencil/terisolir yang belum terjangkau jaringan jalan. Dalam rangka melengkapi jaringan transportasi air (sungai) diperlukan pembangunan dermaga pelabuhan sungai di beberapa titik.

Adapun fungsi dermaga pelabuhan sungai tersebut adalah :

1. Simpul dalam jaringan transportasi.
2. Pintu gerbang bagi daerah yang belum terjangkau jaringan jalan.
3. Tempat kegiatan alih moda transportasi.
4. Tempat koleksi dan distribusi barang/hasil produksi.

Tabel III.2
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Urusan Pemerintahan Perhubungan

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD
1	<ul style="list-style-type: none"> • PKL Muara Beliti • PKL Muara lakitan • PPK Simpang Terawas • PPK Megang Sakti • PPK Simpang Semambang 	<ul style="list-style-type: none"> • PKL Muara Beliti • PPK Simpang Terawas 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan pusat koleksi distribusi barang • Penetapan pusat jasa pengolah pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terminal barang • Terminal Penumpang • lokasi Parkir
2	Aksesibilitas ke dan dari luar kawasan Kabupaten Musi Rawas	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan primer dan lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan Peningkatan jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian Pola Pergerakan • Perlengkapan lalulintas
3	• Pengembangan kawasan agropolitan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terminal / sub terminal agrobisnis / barang • Pelabuhan Sungai 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan Terminal dan pelabuhan sungai 	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian Pola Pergerakan • Perlengkapan lalulintas

Tabel III.3
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah
Urusan Pemerintahan Perhubungan

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD
1	Kawasan Lindung dan kawasan budidaya	Kawasan Budidaya	Perwujudan kawasan lindung dan mitigasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Penyebaran informasi dan perwujudan kawasan lindung dan mitigasi bencana melalui Media massa • Dukungan sarana informasi peringatan dini pada daerah rawan bencana
2	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Budidaya Peruntukan Industri • Kawasan Budidaya Peruntukan Pariwisata 	Kawasan Budidaya Peruntukan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan hunian dan infrastruktur wilayah • Pembangunan kawasan industri besar dan sedang • Pembangunan penunjang pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengkajian Implikasi sistem kegiatan dan sistem lalu lintas terhadap sistem operasional lalulintas • Pengkajian pola lalu lintas dan sediaan angkutan umum • Terminal angkutan wisata dan tempat parker

3	Kawasan Strategis Kabupaten	Kawasan Budidaya	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan prasarana kawasan dan fasilitas ekonomi pada kawasan strategis• Penataan kawasan koridor jalur jalan	Penyediaan sarana dan prasarana lalulintas
---	-----------------------------	------------------	---	--

3.5. *Penentuan Isu-isu Strategis*

Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan untuk memenuhi tuntutan perkembangan birokrasi yang professional sebagai konsekuensi derasnya arus informasi dan arus globalisasi, sudah selayaknya Bappeda Musi Rawas mengambil langkah-langkah menuju perubahan, serta mempersiapkan hal-hal yang diperlukan guna menyempurnakan kekurangan selama ini. Untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang yang sudah barang tentu akan semakin kompleks. Langkah-langkah dan persiapan-persiapan tersebut sangat perlu diambil guna mewujudkan profesionalitas, akuntabilitas, kredibilitas, dan memiliki integritas yang tinggi dalam hal perencanaan. Kekurangan dan kelemahan dimasa lalu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang, kualitas perencanaan dapat lebih ditingkatkan, monitoring dan evaluasi dapat berjalan efektif, efisien dan menyeluruh seperti yang diharapkan, koordinasi internal dan eksternal organisasi berjalan dengan baik dalam suasana yang kondusif untuk mencapai kondisi yang diharapkan yaitu :

- Berkembangnya Transportasi Darat guna melayani angkutan hasil produksi pertanian, pertambangan dan mempercepat arus penduduk dari pedesaan ke pasar kecamatan terdekat dan Kota Lubuklinggau.
- Berkembangnya Transportasi Air dengan memanfaatkan alur Sungai Musi dan sekitarnya sebagai sarana transportasi alternative dalam melayani angkutan hasil produksi terutama hasil tambang yang berskala besar.
- Adanya tujuan organisasi yang jelas, target kinerja yang terukur serta penilaian kinerja yang rasional dan proporsional dalam kaitannya dengan peningkatan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia aparatur perencanaan.
- Tersedianya Sistem Informasi Manajemen pada masa yang akan datang adalah suatu keharusan, hal ini diperlukan guna menghasilkan produk perencanaan yang lebih berkualitas, berimbang dan berkelanjutan serta terwujudnya monitoring dan evaluasi yang

efektif, efisien dan menyeluruh serta terukur sesuai dengan RPJMD 2016-2021 sebagai usaha menuju kondisi yang diharapkan.

Isu isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

- Peningkatan profesionalisme aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas disertai peningkatan fasilitas pendukungnya (sarana dan prasarana aparatur) untuk membantu kelancaran pelayanan prima di bidang Transportasi;
- Sumsel menjadi salah satu provinsi penyelenggara Asian Games 2018, sehingga akan dibutuhkan pergerakan barang dan penumpang yang aman dan nyaman serta lancar..
- Meningkatnya pembangunan jalan sehingga fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) memerlukan penambahan dan perbaikan / penggantian;
- Fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) yang diperlukan agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi;
- Penyediaan lahan parkir yang memadai di beberapa titik terutama pada tempat-tempat wisata dan penanganan serta penertiban parkir liar.
- Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum dan barang disertai penyediaan alat uji kendaraan bermotor yang memadai.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

PENGERTIAN TUJUAN

Tujuan adalah penjabaran visi dan misi, dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Perangkat Daerah. Tujuan berupa target yang bersifat kuantitatif dan merupakan pencapaian ukuran keberhasilan kinerja Perangkat Daerah.

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

tujuan Dinas Perhubungan Kabuapten Musi Rawas adalah Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang baik di bidang transportasi seperti halnya menyediakan sarana dan prasarana penunjang transportasi agar terciptanya kenyamanan, keamanan dan keselamatan di jalan serta mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas. Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan teknologi transportasi serta peningkatan kualitas SDM transportasi yang berdampak kepada maksimalisasi dayaguna dan minimasi biaya yang menjadi beban masyarakat, dengan sasaran pembangunan transportasi.

PENGERTIAN SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yaitu Meningkatkan Pelayanan Publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. adapun sasaran dari Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas adalah Meningkatkan Fasilitas Keselamatan Transportasi dengan indikator tujuan seperti tabel dibawah ini :

TABEL IV. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2017-2021				
				5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik	Meningkatnya fasilitas keselamatan transportasi	1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur perhubungan (%) 2. Persentase penurunan kejadian kecelakaan	77 0,83	79 0,73	81 0,63	83 0,53	85 0,43

PENGERTIAN INDIKATOR

Indikator merupakan alat atau media yang dipergunakan dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya indikator akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau telah dicapai sesuai dengan yang di rencanakan. indikator yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan validitas yang lebih baik dan lebih menggambarkan kinerja suatu organisasi.

indikator adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. indikator harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. indikator memberikan penjelasan baik secara kuantitatif ataupun kualitatif apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. indicator memberikan penjelasan sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga agar segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan.

TABEL V. 1

Visi : <i>Mewujudkan "MURA SEMPURNA 2021"</i> "Sejahtera, Mandiri, Produktif, Unggul, Religius, Nyaman, dan Aman"			
Misi : 1. Memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik	Meningkatnya fasilitas keselamatan transportasi	Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur bidang perhubungan secara merata sampai ke pedesaan	1. Mura Lancar, Layak, Nyaman dan Selamat 2. Gema Proaktif (Gerakan Mura Produktif dan Kreatif) 3. PM2S (Perusahaan



			Maju, Masyarakat Sejahtera)
--	--	--	-----------------------------------

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program kerja operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan kebijakan, untuk itu Dinas Perhubungan menetapkan program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
7. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
9. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
10. Program Pembangunan Sarana & Prasarana Perhubungan
11. Program Peningkatan kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
12. Program Pengembangan LLASD & KA

5.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
- 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 6) Penyediaan alat tulis kantor
- 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



- 8) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- 9) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 10) Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan
- 11) Penyediaan bahan logistik kantor
- 12) Penyediaan makanan dan minuman
- 13) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 14) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- 15) Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis perkantoran

5.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- 2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
- 3) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 4) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

5.1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 2) Pengadaan pakaian olahraga

5.1.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

- 1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- 2) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- 3) Inhouse Training (Perhubungan)

5.1.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan kinerja di PD
- 2) Penyusunan evaluasi kepuasan konsumen terhadap pelayanan bidang perhubungan
- 3) Inventarisasi dan survey analisa kebutuhan sarana bidang perhubungan

5.1.6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

- 1) Rehabilitasi / Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor



- 2) Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
- 3) Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan
- 4) Pemeliharaan / Rehabilitasi Fasilitas keselamatan LLAJ
- 5) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLASDP

5.1.7. Program Pembangunan Prasarana fasilitas perhubungan

- 1) Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
- 2) Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

5.1.8. Program Peningkatan Pelayanan angkutan

- 1) Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
- 2) Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
- 3) Pengawasan pengangkutan minyak mentah
- 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pedesaan (Pengadaan Moda Transportasi Angkutan Desa Tertinggal) (DAK Afirmasi)

5.1.9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

- 1) Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana transportasi
- 3) Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan lainnya

5.1.10. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas LLAJ

- 1) Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
- 2) Pengadaan Marka Jalan
- 3) Pengadaan pagar pengaman jalan
- 4) Pembinaan Keselamatan transportasi
- 5) Pengadaan Traffichlight / warning light
- 6) Pengadaan RPPJ

5.1.11. Program Peningkatan Kelayakan Pengujian Kendaraan Bermotor

- 1) Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
- 2) Pengadaan alat Pengujian Kendaraan Bermotor
- 3) Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

5.1.12. Program Pengembangan LLASDP & KA

- 1) Pengendalian lalu lintas sungai
- 2) Pensertifikatan tanah peti kemas



Pendanaan Indikatif

Tabel VI.1
Rencana Program Prioritas yang disertai Pendanaan Indikatif
Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstras Pernaagkat Daerah			
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target			Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik	Meningkatnya fasilitas keselamatan transportasi		Belanja Langsung				5.351.598.000		7.452.764.000		5.336.950.000		6.078.962.400		6.086.558.640		7.013.664.504		
		2.09.2.09.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kinerja aparatur dan pelayanan public		10.00%	800.660.000	25.00%	956.940.000	25.00%	978.684.000	50.00%	1.076.552.400	50.00%	1.184.207.640	50.00%	1.302.628.404		
		2.09.2.09.01.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tertelaksananya Administrasi Surat Menyurat dalam 1 Tahun		3 item	1.920.000	2 jenis	1.500.000	2 jenis	1.950.000	2 jenis	2.145.000	2 jenis	2.359.500	2 jenis	2.595.450	Dishub	
		2.09.2.09.01.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terperuhnya ketersediaan Listrik, Telpn dan PAM		12 bulan	60.000.000	9 rekening (telp, listik, PAM dan Pembelian Token Listrik) dan Penambahan Tegangan Listrik Kantor Kir	160.000.000	9 rekening (telp, listik, PAM dan Pembelian Token Listrik)	77.000.000	9 rekening (telp, listik, PAM dan Pembelian Token Listrik)	84.700.000	9 rekening (telp, listik, PAM dan Pembelian Token Listrik)	93.170.000	9 rekening (telp, listik, PAM dan Pembelian Token Listrik)	102.487.000	Dishub	
		2.09.2.09.01.01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan yang terpelihara dan terpenuhinya perizinan kendaraan dinas		10 unit	10.000.000	5 unit mobil dan 12 unit motor	10.000.000	5 unit mobil dan 12 unit motor	11.000.000	5 unit mobil dan 12 unit motor	12.100.000	5 unit mobil dan 12 unit motor	13.310.000	5 unit mobil dan 12 unit motor	14.461.000	Dishub	
		2.09.2.09.01.01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan		12 orang	95.440.000	10 orang	90.000.000	9 org	104.500.000	9 org	114.950.000	9 org	126.445.000	9 org	139.089.500	Dishub	
		2.09.2.09.01.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa retribusi yang dibayar dan ketersediaan alat-alat kebersihan kantor		12 bulan	33.480.000	3 jenis	37.800.000	3 jenis	41.580.000	3 jenis	45.738.000	3 jenis	50.311.800	3 jenis	55.342.980	Dishub	
		2.09.2.09.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		40 item ATK	50.000.000	29 jenis	50.000.000	29 Jenis	66.000.000	29 jenis	72.600.000	29 jenis	79.860.000	29 jenis	87.846.000	Dishub	
		2.09.2.09.01.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		10 item	8.300.000	9 jenis	8.500.000	9 jenis	9.350.000	9 jenis	10.285.000	9 jenis	11.313.500	9 jenis	12.444.850	Dishub	
		2.09.2.09.01.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terperuhnya penerangan bangunan kantor		5 item	10.000.000	4 jenis	7.500.000	4 jenis	11.000.000	4 jenis	12.100.000	4 jenis	13.310.000	4 jenis	14.641.000	Dishub	
		2.09.2.09.01.01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan untuk kelancaran pelayanan bagi aparatur		-	0	6 jenis	70.000.000	6 jenis	77.000.000	6 jenis	84.700.000	6 jenis	93.170.000	6 jenis	102.487.000	Dishub	
		2.09.2.09.01.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan bagi aparatur		12 bulan	40.000.000	6 surat kabar	40.000.000	6 surat kabar	44.000.000	4 item buku	48.400.000	4 item buku	53.240.000	4 item buku	58.564.000	Dishub	



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS



	2.09.2.09.01.01.16.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terperuhnya bahan-bahan logistic kantor		2 item	15.000.000	2 jenis	10.000.000	2 jenis	11.000.000	2 jenis	12.100.000	2 jenis	13.310.000	3 item bahan	14.641.000	Dishub	
	2.09.2.09.01.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya bahan bacaan bagi aparatur		2 kali makan minum tamu dan 15 kali rapat	10.000.000	4 kali makan minum tamu dan 24 kali makan minum rapat	10.000.000	4 kali makan minum tamu dan 24 kali makan minum rapat	11.000.000	4 kali makan minum tamu dan 24 kali makan minum rapat	12.100.000	4 kali makan minum tamu dan 24 kali makan minum rapat	13.310.000	4 kali makan minum tamu dan 24 kali makan minum rapat	14.641.000	Dishub	
	2.09.2.09.01.01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 bulan	170.000.000	30 kali	170.000.000	35 kali	187.000.000	35 kali	205.700.000	40 kali	226.270.000	40 kali	248.897.000	Dishub	
	2.09.2.09.01.01.19.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi di dalam daerah		12 bulan	50.000.000	60 kali	50.000.000	60 kali	55.000.000	65 kali	60.500.000	65 kali	66.550.000	65 kali	73.205.000	Dishub	
	2.09.2.09.01.01.20.	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Tekhnis / Perkantoran	Terperuhnya jasa pendukung administrasi teknis / perkantoran		12 bulan	236.520.000	31 org	236.640.000	31 org	260.304.000	31 org	286.334.400	31 org	314.967.840	31 org	346.464.624	Dishub	
	2.09.2.09.01.01.24.	Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi	Terperuhnya jasa dokumentasi dan dekorasi		3 item	10.000.000	2 jenis	5.000.000	3 jenis	11.000.000	3 jenis	12.100.000	3 jenis	13.310.000	3 jenis	14.641.000	Dishub	
	2.09.2.09.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur		38.00%	350.010.000	40.00%	240.000.000	55.00%	342.100.000	70.00%	358.460.000	85.00%	300.806.000	85.00%	330.886.600		
	2.09.2.09.01.02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas /operasional	Tersedianya Kendaraan operasional		1 unit	150.000.000	-	0	-	0	3 unit	85.000.000	-	0	-	0	Dishub	
	2.09.2.09.01.02.07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor		1 set	24.010.000	2 jenis	85.000.000	1 paket	93.500.000	-	0	-	0	-	0	Dishub	
	2.09.2.09.01.02.22.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor		1 item	40.000.000	2 gedung	60.000.000	2 gedung	99.000.000	2 gedung	108.900.000	2 gedung	119.790.000	2 gedung	131.769.000	Dishub	
	2.09.2.09.01.02.24.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaan Dinas yang dapat dioperasikan		12 bulan	116.000.000	5 unit mobil dan 12 unit motor	75.000.000	5 unit mobil dan 12 unit motor	127.600.000	5 unit mobil dan 12 unit motor	140.360.000	5 unit mobil dan 12 unit motor	154.396.000	5 unit mobil dan 12 unit motor	169.835.600	Dishub	
	2.09.2.09.01.02.26.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara		4 item	10.000.000	5 jenis	10.000.000	5 jenis	11.000.000	5 jenis	12.100.000	5 jenis	13.310.000	5 jenis	14.641.000	Dishub	
	2.09.2.09.01.02.28.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		5 item	10.000.000	2 jenis	10.000.000	2 jenis	11.000.000	2 jenis	12.100.000	2 jenis	13.310.000	2 jenis	13.310.000	Dishub	
	2.09.2.09.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya pelayanan publik		00.00%	0	63.00%	65.000.000	67.00%	150.000.000	70.00%	71.500.000	75.00%	150.000.000	75.00%	78.650.600		
	2.09.2.09.01.03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		-	0	93 stel	65.000.000	-	0	135 set (sepatu, ikat pinggang, jilbab)	71.500.000	-	0	93 stel	78.650.000	Dishub	
	2.09.2.09.01.03.06.	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah pakaian olah raga yang diadakan		-	0	-	0	150 stel	150.000.000	-	0	150 stel	150.000.000	-	0	Dishub	
	2.09.2.09.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		50.00%	55.000.000	55.00%	100.000.000	65.00%	150.000.000	70.00%	107.400.000	80.00%	190.740.000	80.00%	209.814.000		
	2.09.2.09.01.05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Pegawai dan Aparatur		1 org	40.000.000	3 org	60.000.000	9 org	66.000.000	-	0	9 org	72.600.000	9 org	79.860.000	Dishub	
	2.09.2.09.01.05.03.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek		-	0	4 org	40.000.000	4 orang	44.000.000	4 orang	48.400.000	4 orang	53.240.000	4 orang	58.564.000	Dishub	
	2.09.2.09.01.05.48.	Inhouse Training (Perhubungan)	Jumlah pegawai yang diikutsertakan dalam inhouse training		-	0	-	0	2 kali	40.000.000	2 kali	44.000.000	2 kali	48.400.000	2 kali	53.240.000	Dishub	
	2.09.2.09.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		75.00%	125.000.000	90.00%	60.000.000	90.00%	177.500.000	90.00%	105.750.000	90.00%	160.325.000	90.00%	176.357.500		
	2.09.2.09.01.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan		-	0	-	0	4 dokumen	40.000.000	-	0	-	0	-	0	Dishub	
	2.09.2.09.01.06.05.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan		6 dokumen	75.000.000	5 dokumen	60.000.000	5 dokumen	82.500.000	5 dokumen	90.750.000	5 dokumen	99.825.000	5 dokumen	109.807.500	Dishub	
	2.09.2.09.01.06.43.	Penyusunan Evaluasi Kepuasan Konsumen Terhadap Pelayanan Bidang Perhubungan	Jumlah Dokumen hasil evaluasi kepuasan konsumen		-	0	-	0	-	0	1 dokumen	15.000.000	-	0	-	0	Dishub	



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS



2.09.2.09.01.06.44.	Inventarisasi dan Survey analisa kebutuhan sarana bidang perhubungan	Jumlah Dokumen hasil survey analisa kebutuhan sarana dan inventarisasi serta study	4 dokumen	50.000.000	-	0	4 dokumen	55.000.000	-	0	4 dokumen	60.500.000	4 dokumen	66.500.000	Dishub
2.09.2.09.01.15.	Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya Pembangunan prasarana fasilitas Perhubungan	45.00%	261.620.000	48.00%	0	55.00%	319.000.000	70.00%	700.900.000	85.00%	385.990.000	85.00%	424.589.000	
2.09.2.09.01.15.04.	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Frekuensi pelaksanaan Sosialisasi di bidang perhubungan	-	0	-	0	-	0	4 kali	350.000.000	-	0	-	0	Dishub
2.09.2.09.01.15.07.	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Jumlah terminal yang berfungsi dengan baik	12 bulan	261.620.000	-	0	1 Tahun	319.000.000	1 Tahun	350.900.000	1 Tahun	385.990.000	1 Tahun	424.589.000	Dishub
2.09.2.09.01.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatnya cakupan ketersediaan prasarana dan fasilitas LLAJ untuk keselamatan pengguna Jasa / Jalan	36.00%	80.000.000	50.00%	30.000.000	70.00%	54.000.000	80.00%	59.400.000	90.00%	75.340.000	90.00%	82.874.000	
2.09.2.09.01.16.01.	Rehabilitasi / Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah sarana alat PKB yang diperbaiki	-	0	-	0	1 set	10.000.000	1 set	11.000.000	1 set	12.100.000	1 set	13.310.000	Dishub
2.09.2.09.01.16.02.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Volume Prasarana Balai PKB yang di rehabilitasi	-	0	-	0	-	0	-	0	1 unit	10.000.000	1 unit	11.000.000	Dishub
2.09.2.09.01.16.04.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan	Volume terminal / pelabuhan yang direhabilitasi (pelabuhan)	7 item	30.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	11.000.000	2 unit	12.100.000	2 unit	13.310.000	2 unit	14.641.000	Dishub
2.09.2.09.01.16.06.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan LLAJ	Volume fasilitas keselamatan LLAJ yang direhabilitasi	3 item	50.000.000	2 item	20.000.000	2 item	33.000.000	2 item	36.300.000	2 item	39.930.000	2 item	43.923.000	Dishub
2.09.2.09.01.16.08.	Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLASDP	Terperuhnya prasarana dan fasilitas LLASDP yang baik	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Dishub
2.09.2.09.01.17.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya kesadaran tertib beratu lintas bagi pengguna jasa / jalan	30.00%	1.934.950.000	32.00%	4.434.764.000	70.00%	825.000.000	80.00%	1.444.500.000	90.00%	598.950.000	90.00%	1.648.845.000	
2.09.2.09.01.17.05.	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Intensitas pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	-	0	3 kali 5 tik	30.000.000	8 kali	110.000.000	8 kali	121.000.000	8 kali	133.100.000	8 kali	146.410.000	Dishub
2.09.2.09.01.17.12.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Jumlah rumah-rumahan, aksesorisnya dan mutasi plat	-	0	13 unit	300.000.000	19 unit	330.000.000	-	0	-	0	-	0	Dishub
2.09.2.09.01.17.16.	Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Intensitas koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	7 kali PAM dan 13 unit kendaraan roda 4	1.934.950.000	12 kali	70.000.000	15 kali	220.000.000	15 kali	242.000.000	20 kali	266.200.000	20 kali	292.820.000	Dishub
2.09.2.09.01.17.18.	Pengawasan Pengangkutan Minyak Mentah	Insentif Pengawas angkutan migas	-	0	12 bulan	50.000.000	12 bulan	165.000.000	12 bulan	181.500.000	12 bulan	199.650.000	12 bulan	219.615.000	Dishub
2.09.2.09.01.17.xx	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pedesaan (Pengadaan Moda Transportasi Angkutan Desa Tertinggal) (DAK Afirmasi)	Tersedianya kendaraan R4 untuk operasional desa tertinggal dan sangat tertinggal beserta rumah-rumahan, aksesorisnya dan mutasi plat	-	0	19 unit kendaraan R4 (17 unit Pick-Up beserta rumah-rumahan dan aksesorisnya dan 3 unit Microbus)	3.984.764.000	-	0	5 unit	900.000.000	-	0	5 unit	990.000.000	Dishub
2.09.2.09.01.18.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan guna keselamatan transportasi	50.00%	0	50.00%	0	55.00%	554.000.000	60.00%	169.400.000	70.00%	586.340.000	70.00%	204.974.000	
2.09.2.09.01.18.02.	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	Volume halte bus yang terbangun	-	0	-	0	2 unit	154.000.000	2 unit	169.400.000	2 unit	186.340.000	2 unit	204.974.000	Dishub
2.09.2.09.01.18.04.	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan lainnya.	Volume halte bus yang terbangun	-	0	-	0	100 buah	400.000.000	-	0	100 buah	400.000.000	-	0	Dishub
2.09.2.09.01.19.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Terperuhnya pengendalian dan pengamanan untuk keselamatan pengguna jalan	46.00%	275.000.000	46.00%	571.060.000	70.00%	572.166.000	80.00%	781.150.000	90.00%	997.515.000	90.00%	1.097.266.500	
2.09.2.09.01.19.01.	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Terperuhnya kebutuhan rambu-rambu lalu lintas	-	0	2 paket	210.000.000	-	0	150 nama jalan 200 rambu	265.000.000	150 nama jalan 200 rambu	291.500.000	150 nama jalan 200 rambu	320.650.000	Dishub



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS



	2.09.2.09.01.19.02.	Pengadaan Marka Jalan	Terperuhnya kebutuhan marka jalan		6 bulan	110.000.000	1.080 m'	296.060.000	1.080 m'	325.666.000	-	0	10.000 m'	350.000.000	10.000 m'	385.000.000	Dishub
	2.09.2.09.01.19.03.	Pengadaan pagar pengaman jalan	Terperuhnya kebutuhan pagar pengaman		-	0	-	0	-	0	200 m'	200.000.000	200 m'	220.000.000	200 m'	242.000.000	Dishub
	2.09.2.09.01.19.10.	Pembinaan Keselamatan Transportasi	Terlaksananya Pembinaan bagi pelajar, sopir / awak kendaraan umum, masyarakat		1 kali	75.000.000	130 buah helm, 30 srel rompi	65.000.000	1 kali	71.500.000	1 kali	78.650.000	1 kali	86.515.000	1 kali	95.166.500	Dishub
	2.09.2.09.01.19.11.	Pengadaan Traffclight / Warning Light	Tersedianya Traffclight / Warning light		2 unit	90.000.000	-	0	3 titik	175.000.000	3 titik	192.500.000	-	0	-	0	Dishub
	2.09.2.09.01.19.14.	Pengadaan RPPJ	Tersedianya RPPJ		-	0	-	0	-	0	3 unit	45.000.000	3 unit	49.500.000	3 unit	54.450.000	Dishub
	2.09.2.09.01.20.	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya pelayanan publik PKB		45.00%	1.469.358.000	55.00%	995.000.000	65.00%	1.094.500.000	70.00%	1.203.950.000	75.00%	1.324.345.000	75.00%	1.456.779.500	
	2.09.2.09.01.20.02.	Pengadaan alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya alat PKB (Peralatan Pengujian (Brake Tester Set, Gas Analyzer, Smoke Tester, Alat Uji Kegelman Kaca, Panel Distribusi dan Instalasinya)		3 item	1.395.358.000	2 item	915.000.000	2 item	1.006.500.000	1 Paket	1.107.150.000	1 Paket	1.217865.000	1 Paket	1.339.651.500	Dishub
	2.09.2.09.01.20.04.	Penyediaan Bahan Pengujian Kendaraan bermotor	Jumlah item bahan kelengkapan PKB		2 item	74.000.000	2 jenis	80.000.000	2 jenis	88.000.000	2 jenis	96.800.000	2 jenis	106.480.000	2 jenis	117.128.000	Dishub
	2.09.2.09.01.20.03.	Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Terlaksananya uji petik kendaraan bermotor		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Dishub
	2.09.2.09.01.22.	Program Pengembangan LLASDP & KA	Meningkatnya pelayanan dan keselamatan LLASDP & KA		0.00%	0	5.00%	0	20.00%	120.000.000	27.00%	0	30.00%	132.000.000	30.00%	0	
	2.09.2.09.01.22.03.	Pengendalian Lalu Lintas Sungai	frekuensi pengendalian lalu lintas sungai		-	0	-	0	1 Tahun	120.000.000	-	0	1 Tahun	132.000.000	-	0	Dishub
	2.09.2.09.01.22.04.	Pemsertifikatan Tanah Peti Kemas	Luas tanah yang disertifikat		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Dishub

BAB VII

INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

RPJMD mempunyai kedudukan sebagai pedoman umum bagi Aparatur Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Organisasi Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan pembangunan daerah. Memperhatikan hal tersebut maka dokumen RPJMD Kabupaten Musi Rawas merupakan dokumen yang memiliki hubungan yang kuat dengan dokumen perencanaan lainnya. Dalam implementasinya, RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Strategis PD yang harus disusun dalam rangka memenuhi target capaian Kinerja masing-masing PD yang berlandaskan kepada anggaran.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017-2021 ini disusun dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Musi Rawas untuk kurun waktu yang sama berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman pada ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam Pelaksanaan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan perlu dilakukan kordinasi antar lintas PD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sehingga pelaksanaan akan berjalan sesuai rencana dan terukur dan berhasil guna kepada masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas tidak terlepas dari berkoordinasi dengan Dinas terkait. Pelaksanaan koordinasi ini dilakukan melalui musrembang, musrena dan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA).

Rincian indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada table berikut :

TABEL VII. 1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur perhubungan (%)	75%	77%	79%	81%	83%	85%	
2.	Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan	0,93%	0,83%	0,73%	0,63%	0,53%	0,43%	



**TABEL VII.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus Penghitungan (IKU) / Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PERHUBUNGAN								
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik	Meningkatnya fasilitas keselamatan transportasi	1.1 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur perhubungan (%)	1.1.1 Jumlah Moda Transportasi Darat yang Memenuhi Persyaratan 1.1.2 Jumlah Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas 1.1.3 Jumlah Rambu-rambu Lalu Lintas yang Diperbaiki	Jumlah Kendaraan yang Layak Sebagai Angkutan Barang/Orang Untuk di Hibahkan Kepada Organisasi-organisasi di Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal di Kabupaten Musi Rawas Jumlah Rambu-rambu Lalu Lintas yang di Pasang pada Tahun n Jumlah Rambu-rambu Lalu Lintas yang Diperbaiki	Unit Unit/ buah Unit/ Buah	DISHUB DISHUB DISHUB	DISHUB DISHUB DISHUB





No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus Penghitungan (IKU) / Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PERHUBUNGAN								
				1.1.4 Jumlah Pembangunan Sarana Perhubungan	Jumlah Sarana Perhubungan yang ada/sudah terbangun	Unit/ Buah	DISHUB	DISHUB
				1.1.5 Jumlah Pembangunan Prasarana Perhubungan	Jumlah Sarana Perhubungan yang ada/sudah terbangun	Unit/ Buah	DISHUB	DISHUB
		1.2 Persentasae Penurunan Kejadian Kecelakaan	1.2.1 Jumlah SDM yang Menguasai Teknik Perhubungan	1.2.1 Jumlah SDM yang Menguasai Teknik Perhubungan	Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Bidang Perhubungan	Orang	DISHUB	DISHUB
			1.2.2 Jumlah Pelajar SMA/SMK Sederajat yang Mengikuti Pemilihan Pelopor Pelajar	1.2.2 Jumlah Pelajar SMA/SMK Sederajat yang Mengikuti Pemilihan Pelopor Pelajar	Jumlah Pelajar SMA/SMK Sederajat yang Mengikuti Lomba Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Peserta/ Orang	DISHUB	DISHUB





No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus Penghitungan (IKU) / Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PERHUBUNGAN								
				1.2.3 Jumlah Sosialisasi dan Pengendalian Disiplin Pengguna Jasa Transportasi	1.2.3.1 Jumlah Pengamanan dan Pengendalian Disiplin dalam berlalu lintas di jalan	Kali	DISHUB	DISHUB



TABEL VII.3
RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	Urusan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Data Awal Renstra / RPJMD Tahun 2015	Tahun						Akhir Renstra / RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PERHUBUNGAN											
1.1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi Untuk Kelancaran Arus Orang dan Barang.										
		Jumlah Moda Transportasi Darat yang Memenuhi Persyaratan	Unit	43	0	13	20	12	0	0	45
		Jumlah Pembangunan Prasarana Perhubungan	Unit	1	1	0	0	0	1	0	2





NO	Urusan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Data Awal Renstra/ RPJMD Tahun 2015	Tahun						Akhir Renstra / RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Terpenuhinya Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Transportasi										
		Jumlah Pemasangan Rambu- rambu Lalu Lintas	Unit	146	149	140	152	151	124	84	800
		Jumlah Rambu-rambu Lalu Lintas yang Diperbaiki	Unit	27	32	35	37	40	30	26	200
1.3	Meningkatnya ketersediaan administrasi umum dan kepegawaian	Jumlah SDM yang Menguasai Teknik Perhubungan	Orang	6	2	2	2	5	10	10	31
1.4	Terselenggaranya Ketertiban Lalu Lintas	Jumlah Pelajar SMA/SMK Sederajat yang Mengikuti Pemilihan Pelajar Pelopor	Peserta/ Orang	36	20	37	0	0	40	40	280
		Jumlah Sosialisasi dan Pengendalian Disiplin Pengguna Jasa Transportasi	Kali	113	20	20	20	20	20	20	120

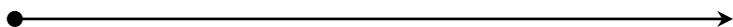


STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN PERDESAAN
(Permenhub No. 29 Tahun 2015)

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
2.	KESELAMATAN					
	a. Pengemudi					
	1) Kondisi fisik.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat.	Sehat	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 1 (satu) tahun sekali.	
	2) Kompetensi	Pengemudi memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku sebagai berikut : 1. pengetahuan tentang rute yang dilayani, tata cara mengangkut orang, dan tata cara berlalu lintas; 2. keterampilan mengemudi kendaraan sesuai dengan jenis kendaraan; 3. sikap dan perilaku yang baik, hormat dan ramah terhadap penumpang.	Sebagai bukti pengemudi mengerti etika berlalu lintas	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	
	2) a. Jam istirahat	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut.	Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima.	Kondisi pengemudi prima.	Diterapkannya jam istirahat pengemudi.	
	b. Lampu senter	Alat bantu penerangan.	Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat.	Ketersediaan.	Paling sedikit 1 (satu) unit.	
	b1. Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang	Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan.	Untuk menjamin keselamatan penumpang.	Ketersediaan dan Berfungsi	Dapat berfungsi dengan baik.	
	b2. Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir.	Untuk menjamin keselamatan.	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir.	Ban depan tidak vulkanisir.	
	b3. Rel korden (gorden) di jendela.	Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan).	Mempercepat proses evakuasi.	Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas.	Posisi rel gorden terpasang pada sisi jendela paling atas.	
	b4. Alat pembatas	Alat pembatas kecepatan yang	Untuk mengendalikan kecepatan	Terpasangnya alat	Dapat berfungsi dengan baik.	

	kecepatan.	dipasang pada kendaraan angkutan umum.		pembatas kecepatan.		
	b5. Pegangan Tangan (hand grip)	Pemasangan hand grip pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar (gang).	Sebagai tempat pegangan penumpang yang berdiri apabila terjadi pengereman mendadak.	Terpasangnya pegangan tangan pada setiap sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi terluar.	Terpasang.	
	b6. Pintu keluar masuk pengemudi sekurang – kurangnya untuk bus sedang.	a. Untuk mesin bus yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi. b. Untuk mesin di depan, pintu hanya boleh digunakan teknisi.	Mendorong pengemudi lebih bertanggung jawab terhadap penumpang dalam mengoperasikan kendaraan.	a. Tidak terpasangnya pintu pengemudi. b. Tidak terpasang.	Tidak terpasang.	
	b7. Alat pemukul / pemecah kaca (martil)	Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat.	Memecahkan kaca kendaraan pada saat kendaraan darurat.	Ketersediaan	1 (satu) pada setiap 1 (satu) jendela.	
	b8. Alat pemadam api ringan (APAR)	Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.	Ketersediaan.	2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok / reflektif.	
	b9. Kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi standar nasional Indonesia (SNI)	Kabel listrik untuk fasilitas penunjang.	Untuk menyalakan audio system, jam digital, slot papan trayek (LED) dan Bel Penumpang.	Tersedia.	Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia).	
	b10. Sabuk keselamatan	Sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk.	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang.	Tersedia.	Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk.	
	c. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pengecekan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	
	d. Dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang dan dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan lalu lintas jalan.	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi : a. Penumpang; dan b. Pengemudi.	

3.	KENYAMANAN					
	a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut.	Untuk menjamin kenyamanan penumpang.	Jumlah penumpang per kendaraan.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut	
	b. Fasilitas sirkulasi udara.	Berupa jendela maupun kap di bagian atas kendaraan yang dapat dibuka/ditutup.	Untuk menjaga suhu di ruangan tidak terlalu menyengat terutama pada saat cuaca panas atau disaat AC tidak berfungsi.	Jumlah berfungsi.	Semua berfungsi dengan baik.	
	c. Fasilitas kebersihan.	Berupa tempat sampah dan/atau kantung kertas atau plastic.	Untuk menjaga kebersihan dalam kendaraan.	Ketersediaan.	Harus tersedia paling sedikit 1 (satu) buah diletakkan dalam kendaraan.	
	c1. Pengatur suhu ruangan.	Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC (<i>air conditioner</i>)	Untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang.	1. Ketersediaan. 2. Suhu	1. Harus tersedia dan berfungsi dengan baik. 2. Suhu dalam kendaraan 20 – 22 °C	
	c2. Larangan Merokok.	Berupa stiker dan dengan gambar dan/atau tulisan “Dilarang Merokok”.	Untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Tersedia dan terpasang dengan baik.	Harus tersedia paling sedikit 2 (dua) buah ditempatkan pada ruang penumpang pada kaca samping kanan dan samping kiri kendaraan.	



BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Renstra 2016 – 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas Perhubungan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan transportasi lima tahun kedepan. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan-kegiatan Dinas Perhubungan juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

Dokumen Renstra Dinas perhubungan ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen Perubahan Renstra dilakukan sehubungan dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas tahun 2016-2021.

Muara Beliti,

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Musi Rawas,



Drs. ADI WINATA, M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19730908 199302 1 003